



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 April 2020
Waktu	: 10.15 WIB s.d 13.25 WIB
Tempat	: Kantor/rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Melanjutkan Rapat tanggal 8 April 2020 Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 45 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

10 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Surnarna, S.E., M.Hum.
3. Drs. I Made Urip, M.Si.
4. H. Yadi Srimulyadi
5. Ir. Mindo Sianipar
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
9. Maria Lestari, S.Pd.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

4 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Ir. Ichsan Firdaus
4. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
3. H. Charles Meikyansah
4. Yessy Melania, S.E.
5. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Drs. H. Ibnu Multazam
6. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, MM.
2. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
3. Muslim, S.HI, MM.
4. Bambang Purwanto, S.ST., MH.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. H. Johan Rosihan, S.T.
4. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

2. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
3. Slamet Aryadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BP2SDM));
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta jajarannya,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal rapat DPR RI Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 20 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 31 Maret 2020, pada hari ini Rabu, 15 April 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BRG yang merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja tanggal 8 April 2020 dalam rangka membahas *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI Rapat Kerja ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Rapat Kerja ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dan diakhiri pada pukul 12.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama. Susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI merupakan tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Restorasi Gambut pada tanggal 8 April 2020. Sesuai dengan butir 2, kesimpulan Rapat Kerja dimaksud telah disepakati bahwa Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program bantuan sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, serta para petugas yang mengabdikan dirinya dilingkungan hidup dan kehutana yang terkena dampak covid-19 sebesar minimum 10% dari anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya dalam butir 2 kesimpulan Rapat Kerja tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran program kebun bibit rakyat, program kebun bibit desa, program pembangunan perhutanan sosial nasional serta program lainnya yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli API, bekerja sama kelompok dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi dan manfaat hasil usaha yang dikembangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana dapat menyampaikan penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I pada pagu anggaran Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp7.736.642.116.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan terkait hal-hal tersebut di atas.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera.

Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan Rapat Kerja ini. Dan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas berbagai arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 8 April 2020 dan berbagai Rapat Kerja lainnya. Dan hari ini ijin kami melaksanakan sesuai dengan kesimpulan rapat tindak lanjut, yaitu melaporkan hasil kerja untuk penghematan dan refocusing anggaran KLHK untuk tahun 2020.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Selanjutnya ijin kami melaporkan sesuai dengan materi, pertama rencana kerja anggaran secara singkat pada tahun 2020, Kira-kira apa saja isi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan yang ketiga tentang refocusing atau reorientasi kegiatan eselon I KLHK. Dan saya juga mohon ijin untuk nanti melaporkan arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada waktu yang lalu berkenaan dengan Bansos dan CSR.

Terima kasih, jadi kami mohon ijin melanjutkan. Secara tertulis dokumen telah sudah kami sampaikan. Saya mohon ijin untuk kita langsung kepada screen 7, bahwa pada tahun 2020 ini sudah beberapa kali dan berulang kali kita sampaikan dan kita diskusikan di dalam Rapat Kerja bersama yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu bahwa KLHK terkait dengan rencana kerja Pemerintah pada 3 prioritas nasional, yaitu prioritas nasional pertama pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yaitu pada program prioritas pengentasan kemiskinan, lalu pada prioritas nasional yang ketiga berkenaan dengan nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Pada program

prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi serta peningkatan produktifitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, serta prioritas nasional yang kelima, yaitu berkaitan dengan prioritas nasional yang keempat, yaitu berkenaan dengan ketahanan pangan, air, *energy* dan lingkungan hidup para program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Selanjutnya pada halaman berikut, ini catatan-catatan tentang program, berapa banyak program prioritas KLHK, kemudian juga proyek prioritas dan sebagainya. Kami mohon ijin untuk mari kita mohon periksa pada halaman 10. Jadi terkait dengan kegiatan prioritas pada prioritas nasional, yaitu berkaitan dengan reforma agrarian dan kehutanan sosial yang rinciannya kurang lebih rincian agendanya dapat dan mohon periksa pada halaman berikut halaman 11.

Selanjutnya pada kegiatan prioritas pada prioritas nasional yang ketiga di halaman 12, yaitu berkaitan dengan nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Ada nilai pagunya disitu di struktur anggaran yang lama, yaitu berkenaan dengan kegiatan peningkatan industry berbasis pertanian yang terintegrasi hulu dan hilir dan peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata termasuk wisata alam.

Kemudian dalam program prioritas peningkatan produktifitas tenaga kerja dan cipta lapangan kerja, yaitu berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan. Kemudian bagaimana uraian kegiatannya mulai periksa pada halaman 13.

Selanjutnya berkenaan dengan program nasional yang keempat ketahanan pangan, air, *energy*, dan lingkungan hidup. Beberapa program prioritas pada PN4 ini, yaitu peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, penataan kawasan hutan, pemeliharaan dan konservasi serta agenda Citarum Harum, agenda integrasi, kemudian program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup berkenaan dengan pencegahan pencemaran, kerusakan dan lingkungan, kemudian penanggulangan pencemaran, lalu pemulihan dan penguatan kelembagaan, mohon periksa pada halaman 15 dan 16.

Dengan program-program and arahan itu, maka mohon ijin kami secara *over view* menyampaikan program di pagu awal belanja non operasional di halaman 19, lalu prioritas nasional pada halaman 20. Dan mari kita periksa bagaimana pagu awal Kementerian LHK pada tahun 2020, yaitu Sekretariat Jenderal Rp592 miliar, kemudian Inspektorat Jenderal Rp86 miliar dan seterusnya inilah konfigurasi awal dari DIPA Kementerian LHK dengan jumlah Rp9 triliun yang kemudian harus dikoreksi dengan adanya masalah *COVID* ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 pada halaman berikut.

Materi di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 telah kami sampaikan pada Rapat Kerja yang lalu, bahwa ada perubahan postur, fokus belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian serta penghematan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Pagu awal KLHK Rp9.319.325.816.000,00 dilakukan penghematan sebesar Rp1.582.683.700.000,00 menjadi Rp7.736.642.116.000,00 beberapa penghematan dan selain itu juga orientasi kebijakan operasional, yakni keselamatan untuk atasi penyebaran *pandemic*, keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi dan perhutanan sosial, padat karya, stimulus ekonomi dan keberlanjutan pelayanan publik.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Saya mohon ijin untuk melaporkan bahwa dalam penghematan ini dilakukan dengan kriteria yang memperhatikan asumsi waktu pelaksanaan, yaitu Juli sampai dengan Desember. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan kepastian lahan untuk pelaksanaan kegiatannya disamping juga kami mempelajari kinerja 2017, 2018, 2019. Kita hapuskan perjalanan dinas dan paket meeting yang tidak perlu. Kemudian belanja modal yang ditunda serta penyesuaian target.

Ada beberapa kegiatan yang menurut aturan dan ketentuan dihilangkan atau dikurangi akan tetapi perlu dipertahankan, yaitu belanja operasional pegawai, kemudian seperti gaji, kemudian peralatan, listrik dan lain-lain, kemudian surat berharga, hibah luar negeri, Rupiah pendamping, PNBP dan yang terkait langsung dengan masyarakat sebagaimana diarahkan oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada rapat yang lalu. Dan juga pemeliharaan tanaman rehabilitas hutan dan kegiatan-kegiatan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Dengan demikian, maka dari penghematan ini bisa kita lihat. Konfigurasi per eselon I program, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal dari Rp592.759.666.000,00 menjadi Rp551.945.161.000,00
2. Inspektorat Jenderal dari Rp86.966.609.000,00 menjadi Rp66.902.803.000,00
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Rp301.754.834.000,00 menjadi Rp262.287.702.000,00
4. Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dari Rp2.799.916.214.000,00 menjadi Rp2.254.913.073.000,00
5. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari pagu Rp2.049.226.996.000,00 menjadi Rp1.706.647.553.000,00

6. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Rp480.427.464.000,00 menjadi Rp400.234.982.000,00
7. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi dari Rp393.833.245.000,00 menjadi Rp373.643.107.000,00
8. Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dari Rp341.386.089.000,00 menjadi Rp283.680.150.000,00
9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Rp458.679.200.000,00 menjadi Rp412.986.210.000,00
10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Rp468.790.771.000,00 menjadi Rp379.895.916.000,00
11. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dari Rp313.272.831.000,00 menjadi Rp252.988.868.000,00
12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dari Rp361.844.139.000,00 menjadi Rp286.512.482.000,00
13. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Rp357.472.233.000,00 menjadi Rp270.059.363.000,00
14. Badan Restorasi Gambut dari Rp312.995.525.000,00 menjadi Rp233.945.046.000,00

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Itulah gambaran konfigurasi setelah dilakukan penghematan sekaligus bersamaan dengan langkah kita sebagaimana arahan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja yang lalu, yaitu untuk *refocusing* dan reorientasi. Saya mohon ijin untuk kita bisa periksa halaman 29 sampai dengan halaman 33.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Kalau kita lihat maka *refocusing* anggaran ini akan terlihat di Sekretariat Jenderal, dalam bentuk pembelian produk herbal suplemen dari kelompok tani hutan untuk pegawai dan sekaligus untuk peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian di Ditjen PAPL bantuan pelaku usaha, bantuan kelompok petani hutan produksi. Di Ditjen DAS dan Hutan Lindung 1.200 unit kebun bibit rakyat, 170 unit kebun bibit desa, dan ini mungkin 2.500 maksudnya, 2.500 bibit produktif.

Kemudian pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota pada Rapat Kerja yang lalu bantuan bagi masyarakat peduli API, masyarakat mitra Polhut, Manggala Agni, sekitar kawasan konservasi, dan juga bantuan bagi pelaku usaha mikro di bidang pariwisata alam.

Sementara di Planologi Kehutanan, bantuan untuk buruh dalam pekerjaan tata batas hutan, dan pembelian produk herbal suplemen dari masyarakat, dari kelompok tani hutan bagi kesehatan karyawan di Balai-Balai di daerah. Badan Litbang dan Inovasi untuk pembuatan disinfektan dan

sekaligus juga kami melaporkan bahwa BLI ini mengalami transformasi setelah adanya Undang-Undang tentang Badan Riset, Badan Litbang ini akan disatukan dan kita membutuhkan Badan Litbang yang bekerjanya transformasi menjadi Badan Standart Instrumen untuk mengawal berbagai standar yang disesuaikan dengan situasi-situasi yang akan datang terkait dengan enforcement dukungan-dukungan untuk kekuatan dalam penerapan standar-standar kerja berkaitan dengan usaha ataupun Amdal dan lain-lain.

Kemudian Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia untuk sistem pelatihan jarak jauh, pelatihan pada masa pandemik dan pelatihan-pelatihan pasca pandemik. Jadi kemudian perhutana sosial dan kemitraan lingkungan untuk pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh, seperti yang kami laporkan di Rapat Kerja yang lalu. Dalam pelatihan masyarakat, pemberian bantuan ekonomi produktif.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Dalam kaitan ini pelatihan dengan system jarak jauh ini, kita modifikasikan dari penyuluhan-penyuluhan yang ataupun sosialisasi yang dibawa ke Dapil. Jadi nanti kita menyiapkan kurang lebih 100 paket latihan yang merupakan kerja sama antara BP2SDM dan PSKL. Saya juga nanti akan minta di PSLB3 untuk sosialisasi dengan system *e-learning* pelatihan, maka disini masyarakat akan melakukan system pelatihan dengan jarak jauh di dalam laporan ini nanti bisa dilihat sistemnya di halaman 46. Itu nanti sistemnya jarak jauh tetapi masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang dilatih ini dengan pesertanya itu akan mendapatkan honorarium. Jadi sosialisasi selama 3-4 hari sudah dihitung kemungkinan mendapatkan honorarium kira-kira Rp750.000,00 per orang per kali latihan.

Nah, bagaimana cara mengatur dalam modifikasi Dapil. Tadi beberapa hari ini kami sudah rapatkan bersama Sekjen dan Direktur Jenderal dan Kepala Balai, bahwa pengantar latihan nanti dari Kementerian dan dari yang terhormat Anggota pada Dapil tersebut. Jadi bicara mungkin 3 menit atau 5 menit sebagai pengantar, motivasi dan dukungan kepada masyarakat lalu berproseslah dengan modul yang dipersiapkan. Jadi seluruh paket ini, jadi masing-masing Dapil yang dipersiapkan dan ini kami akan kordinasikan dengan Sekretariat Komisi IV DPR RI dan tenaga ahli Komisi IV DPR RI, yang terhormat Pimpinan nanti untuk diatur bagaimana distribusinya. Dan sebetulnya sosialisasinya sudah bisa dimulai. Memang ada misalnya pandangan umum yang mengatakan masyarakat minya sembako kok dikasih latihan. Jadi ini sebetulnya kekuatan pemberdayaan masyarakat juga sama dan masyarakat mendapatkan uang saku dan honor yang berguna juga untuk mereka. Sementara yang sembako nanti dengan pola CSR karena dia agak berbeda.

Selanjutnya demikian pula di Gakkum, jadi BP2SDM tadi paketnya juga ada yang terkait dengan Gakkum, yaitu terkait dengan subjek, kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya atas sumber daya alam dan lingkungan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sementara itu Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, sesuai dengan arahan pada Rapat Kerja yang lalu dari Pimpinan dan Anggota yang terhormat. Kita mewaspadai Karhutla dan kita tekankan pada aspek tersebut. Di Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Penyiapan *Drop Box*, limbah fasilitas pelayanan kesehatan, APD, APD Petugas, kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan. Jadi kendaraan pendukung ini juga bisa disiapkan, karena selama ini Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, motor sampah itu sudah tidak boleh lagi menurut Bappenas. Jadi tidak ada lagi, tetapi pada kenyataannya dilapangan, di gang-gang dibutuhkan kendaraan pendukung untuk menyemprotan desinfektan dan ini akan kita fasilitasi di data rinci ini ada di halaman berikutnya.

Kemudian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu dengan dukungan operasional penyemprotan disinfektan dan gerakan bersih dengan mencuci tangan. Ini ada sabun yang kita beli ada sabun yang disumbangkan oleh Gakki. Selanjutnya Badan Restorasi Gambut, *refocusing*-nya dalam revitalisasi ekonomi masyarakat, persemaian sagu, rehabilitasi hutan sagu, maupun pelaksanaan *reduce, re-use, recycle* di Pulau Upat dan seterusnya.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Akhirnya ijin kami melaporkan bahwa secara umum kegiatan *refocusing* ini adalah bahwa kegiatan meeting, pembinaan teknis dan sosialisasi kita lakukan dengan metoda jarak jauh *video conference*. Sidang penanganan kasus juga dilaksanakan dengan *video conference* dan itu sudah dilaksanakan oleh jajaran yudikatif.

Kemudian kegiatan indentifikasi, verifikasi data dan monitoring dan evaluasi berbasis aplikasi teknologi, layana perijinan juga berbasis aplikasi, demikian pula kegiatan setrtifikasi berbasis *online*, pelaksanaan audit juga online. Kemudian dalam kaitan dengan Karhutla dan sebagainya ini juga kami meminta dukungan dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri untuk bisa bersama-sama mengawal di daerah.

Kemudian kegiatan Diklat juga dilakukan dengan *e-learning* tadi seperti yang kami jelaskan tentang pelatihan dan sosialisasi jarak jauh. Kemudian kegiatan Diklat juga untuk petani, kemudian efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang *ceremonial*, kemudian pameran itu sudah saya minta ditiadakan. Kemudian penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sebagaimana juga diarahkan pada Rapat Kerja yang lalu oleh Pimpinan dan Anggota yang terhormat. Jadi penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengutamaan padat karya tunai bagi masyarakat dan penanganan bencana longsor dan banjir dengan pola Bansos, bangunan konservasi tanah dan air, kebun bibit dan penanaman.

Memang kalau kita lihat dilapangan untuk bangunan konservasi tanah dan air yang sederhana misalnya bikin DAM Penahan, itu rakyat ambil batu ya dibayar 1 kubik batunya kira-kira 200 ribu. Angkut batunya ke tempat kegiatan pemasangan itu Rp80 ribu per motor, pas kalau dia ngangkut. Kemudian pasang bronjong dibayar juga, bronjong kawat harganya Rp230 ribu per meter kubik dan sebagainya. Oleh karena itu, langkah-langkah ini yang bisa menolong dan sesuai dengan harapan di dalam *refocusing* anggaran.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Saya mohon ijin untuk mengakhiri laporan berkaitan dengan penghematan dan *refocusing*. Dan mohon periksa secara rinci ada di dokumen selanjutnya pada halaman 34 sampai dengan halaman 63. Dan selanjutnya saya mohon ijin melaporkan bahwa sebagaimana arahan terkait dengan kegiatan Bansos, CSR dan lain-lain. Kami sudah menyiapkan surat tugas dan rapat-rapat sudah dilaksanakan, termasuk hari ini akan dirapatkan bersama sekretariat Komisi IV DPR RI untuk distribusi dalam kaitan dengan Anggota yang terhormat.

Demikian Bapak Ketua, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota. Mohon catatan dan arahan selanjutnya, dan mohon persetujuan atas konfigurasi anggaran setelah penghematan.

Terima kasih, kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri yang terhormat.

Kalau saya lihat disini dalam penghematan atau realokasi ini seharusnya ada beberapa hal yang jangan terlalu besar, misalnya Inspektorat ini sangat penting sekali, karena kita lihat dari pagu anggaran keseluruhan yang Rp6 triliun kalau pengawasnya cuma dapat Rp66 miliar bagaimana untuk biaya perjalanan dan lain-lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini dipotong hampir Rp88 miliar, berarti hampir 20%. Karena penegakan hukum pada saat ini ya orang akan berbuat kejahatan lingkungan maupun penebangan liar, kemudian lagi penyerobotan lahan contohnya seperti di Batam. Ini akan merajalela karena biayanya cukup besar dipangkas. Seperti kesepakatan awal seharusnya rata-rata dipangkas kurang lebih 10%.

Kemudian lagi Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun. Ibu Menteri, tahu saat ini limbah medis paling banyak saat ini. Contohnya masker saja mungkin yang sudah terbuang dibuang kemudian menjadi sampah cukup besar sekali termasuk juga alat rapid test itu otomatis menjadi limbah yang berbahaya. Jadi saya minta hal ini diperhatikan.

Kemudian Badan Restorasi Gambut, dari Rp312.995.000.000,00 dipotongnya Rp79 miliar. Kita pikirkan tidak lama lagi akan musim kemarau, tadi saya lihat dari kegiatan Badan Restorasi Gambut, hampir pembuatan skat kanal dan lain-lain ini dipotongnya cukup besar sekali.

Kemudian kalau kita lihat Kesekjenan dari Rp592 miliar dipotongnya hanya Rp40 miliar. Saya minta tolong dicek ulang kembali sebelum nanti ada persetujuan pagu anggaran yang akan disepakati bersama.

Terima kasih atas penjelasannya Ibu Menteri.

Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 257 jangan terlalu lama, karena waktunya pun terbatas dan yang memimpin Cuma saya sendiri.

Silakan untuk yang pertama yang mewakili Fraksi Gerindra Bapak Azikin.

Silakan

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Ibu Menteri beserta segenap jajarannya yang mendampingi.

Pertama-tama kami mengapresiasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Menteri. Terutama kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi bisa segera diimplementasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terdampak COVID-19 ini bisa merasakan sentuhan-sentuhan langsung dari Pemerintah.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan beberapa hal dan usulan kepada Ibu Menteri. Yang pertama, terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan.

Yang kedua, kesehatan dan kesejahteraan perangkat kerja kehutanan dan lingkungan hidup yakni kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli API, pekerja sampah dan lainnya. Yang kedua, limbah B3 yang meningkat akibat tingginya penggunaan peralatan kesehatan, baik dari

fasilitas kesehatan, maupun dari rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kelestarian daerah wisata.

Selanjutnya adapun jenis kegiatan bantuan yang akan kami harapkan Ibu Menteri, antara lain pemberian bantuan sosial berupa bahan sembako untuk pemenuhan kebutuhan selama masa PSBB. Yang kedua, penyediaan media penyimpanan limbah B3 medis dari fasilitas kesehatan dan rumah tangga. Selanjutnya penyediaan tempat khususnya tempat sampah, khususnya motor sampah dan bank sampah. Motor sampah ini Ibu Menteri masih sangat digunakan terutama daerah-daerah yang jalanannya kecil, mobil sampah tidak bisa masuk, tentunya yang bisa mengatasi masalah itu adalah motor sampah yang dapat mengangkut. Oleh sebab itu Ibu Menteri, kami masih mengusulkan agar motor sampah ini dalam COVID-19 ini sangat kami butuhkan di daerah-daerah.

Ibu Menteri yang kami hormati.

Upaya penanganan dampak covid-19, satu penambahan bahan untuk ... bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kehutanan, mengutamakan ternak daripada tanaman hutan produktif dengan porsi 60 berbanding 40. Demikian yang perlu kami sampaikan dan mungkin masih ada tambahan dari Kapoksi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Kapoksi Bapak Sunarna.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Yang saya hormati Ibu Menteri LHK, semoga selalu sehat wal'afiat tidak kurang suatu apapun dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan negara, Bapak Ketua dan Ibu Menteri yang kami hormati.

Kami sangat mengapresiasi atas kepedulian Ibu Menteri terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Selanjutnya Ibu Menteri, ada tadi beberapa jenis yang disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan terkait padaat karya maupun stimulus ekonomi. Nah, kalau kita mau melakukan stimulus dan sudah jelas disampaikan Ibu Menteri, gamblang terkait *refocusing* yang dilakukan oleh Kementerian KLHK dalam rangka penanganan COVID-19 ini.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Saya melihat paparan Ibu Menteri menyentuh pada seluruh masyarakat, tapi kami tidak kalah pentingnya adalah langkah dan progress dari Kementerian LHK yang telah disampaikan tentu perlu dibuatkan matriknya Ibu Menteri, kapan, anggarannya, pelaksanaan kegiatan itu juga progresnya jelas, matriknya jelas, sehingga kami bisa menyampaikan kepada masyarakat ini kira-kira tanggal sekian, bulan sekian. Karena banyak sekali program dari Pemerintah Pusat itu sekarang itu baru perintah-perintah dan juga di samping perintah juga ancaman. Rata-rata mereka ancaman Kepala Daerah beginilah, kalau begini. Kasihan mereka kerja keras tapi di pusat itu baru ancaman saja belum ada yang secara langsung menyentuh pada warga masyarakat tentunya yang ada di negara dan bangsa kita.

Ibu Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Terkait dengan anggaran yang ada tidak kalah pentingnya malah mendekati, sudah mendekati nantinya kemarau itu juga penanganan kebakaran hutan ini juga harus menjadi utama dan juga masih menjadi prioritas utama dari Kementerian KLHK sendiri.

Selanjutnya Ibu Menteri terkait dengan kawasan hutan, kebetulan kami adalah Cilacap dan Banyumas, bagaimana bahwa boleh lahan perhutanan itu dipakai untuk penanaman jagung pangan termasuk Tapi bukan jagung pakan. Petani sekitar hutan bisa menggunakan Dengan mengeluarkan anggaran untuk Bansos Ibu Menteri khususnya di daerah-daerah kalau Dapil kami Banyumas dan juga Cilaca daerah Gunung Slamet.

Ibu Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Langkah-langkah penting sangat kami harapkan, sangat kami tunggu langkah nyata dari Kementerian yang sangat kami harapkan dalam rangka nanti oleh seluruh warga masyarakat tentunya warga masyarakat di daerah dan bangsa yang kita cintai dan kita banggakan ini Ibu Menteri. Jadi bagaimana lebih mudah dalam rangka penggunaan lahan hutan yang ada di bangsa kita ini dalam rangka penanganan COVID-19 ini untuk lebih memudahkan masyarakat kegiatan dari seluruh masyarakat.

Mungkin itu Ketua yang kami sampaikan tidak banyak, nanti teman-teman Anggota nanti menyampaikan lebih banyak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ketua dan seluruh Anggota sekalian, Ibu Menteri dan seluruh pejabat yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!!!

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Sunarna, Ibu Menteri juga pengennya cepat cuman kana da rambu-rambu peraturan yang harus dijaga, karena apabila melanggar siap-siap nanti dijemput.

Selanjutnya Pak Slamet yang mewakili Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Komisi beserta Pimpinan yang lain, rekan-rekan Anggota Dewan, Ibu Menteri beserta seluruh jajaran eselon I dan seluruh jajaran di KLHK, beserta BRG.

Terima kasih atas waktunya.

Yang pertama, terkait dengan dari Dirjen Pengendalian DAS itu pemotongannya dari 2,7 ke 2,2 sekitar hanya 545 juta. Apakah dalam tahun ini dalam penanganan covid ini tidak sebaiknya atau bisa memberikan alasan kenapa efisiensinya hanya segitu, karena menurut pemikiran saya secara pribadi kalau menurut data BIN kan covid ini sampai Agustus. Sementara penanganan DAS baik dalam rangka nanti reboisasi, kemudian rehabilitasi lahan itu masuk masa kemarau. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa pemotongannya hanya kecil. Apakah refocusingnya dari situ mungkin justru lebih besar untuk kemudian pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti itu, itu catatan saya pertama.

Kemudian yang kedua, sama dengan tadi *e-learning* tadi itu mudah-mudahan program ini cukup bagus, cuman perlu dikaji sejauhmana nanti tingkat efektifitas dari masyarakat kita. Ini termasuk pengawasan walaupun tadi sangat Ketika kemudian pelaksanaannya di Dapil masing-masing sehingga efektifitasnya ini menjadi tanggungjawab kita sebagai Dapil mengawasi penting. Tentunya kita tidak ingin hanya sekedar terselenggaranya kegiatan akan tetapi bagaimana kemudian masyarakat dididik dengan *e-learning* ini bisa. Dan kendala-kendala lain perlu dipertimbangkan, karena sinyal ini juga menjadi faktor pertimbangan utama ketika kita menjalankan *e-learning*. Nah, jadi saya tidak kebayang jangankan di luar Jawa di bagian saya yang dekat Jakarta dari Dapil saya yang selatan, Sukabumi Selatan ini sinyal kadang juga belum bagus. Ini catatan mudah-mudahan nanti sudah diantisipasi oleh KLHK.

Dan yang terakhir, saya punya catatan terakhir terkait dengan BRG. BRG menawarkan refocusingnya itu ada 3 opsi, ada 34, kemudian 79 miliar,

dan 9 miliar. Tentunya bagi saya ya opsi satu yang efisiensi atau refocusing 34 koma itu yang menjadi. Karena kalau terlalu besar ada beberapa pembatalan proyek strategis terkait dengan Karhutla. Jadi kemarin baik kejadian tahun kemarin mungkin sebagian besar sumbernya juga dilahan-lahan gambut, sehingga nanti kita juga ingin mendapatkan gambaran dengan kemudian terjadi *refocusing* ini planning dari BRG sendiri dalam hal mengantisipasi untuk kebakaran hutan berikutnya. Sehingga walaupun tetap terjadi tidak seekstrim tahun kemarin, padahal diprediksi tahun ini dengan terjadi *elnino* akan lebih besar dibandingkan tahun kemarin, sementara ketika terjadi *refocusing* ini tentunya terjadi efisien-efisiensi. Tidak terjadi *refocusing* atau efisiensi saja kemarin seperti itu kondisinya. Nah, ini mungkin ingin mendapatkan gambaran dari BRG khususnya dan juga KLHK secara umum.

Demikian Bapak Ketua, Ibu Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PAN.

Pak Rudi silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri, Bapak Sekjen dan jajarannya, Bapak Ketua yang saya hormati.

Ibu Menteri, dalam realokasi anggaran ini saya hanya mengingatkan saja bahwa pertama jangan lupa kawasan Tambora, jadi agar keuangannya dan yang lain-lainnya kalau dipotong untuk partisipasi nasional ini tidak usah terlalu banyak supaya kedepan teman-teman atau petugas di lapangan bisa bekerja dengan maksimal.

Kemudian tadi masalah motor sampah, motor sampah ternyata memang sangat dipentingkan. Di kampung halaman, di orang-orang kecil motor sampah itu sekarang digunakan untuk mengangkut alat semprot. Oleh karenanya, mungkin Bappenas melihat dulu bahwa tidak akan terjadi ini mungkin bisa disounding kembali, sehingga disamping mengantarkan sampah dan dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan.

Kemudian dalam relokasi anggaran saya mengharapkan agar kepada seluruh jajarannya bisa penyampaiannya tepat sasaran dan jangan sampai permasalahan dalam pencapaian tersebut.

Kemudian yang keempat saya mengingatkan kembali bahwa ujung tombak orang-orang kita dilapangan, saudara-saudara kita, karyawan kita KPH, di samping Sarpras juga dikasih lagi gizi dalam alokasi anggaran ini supaya mereka tetap semangat bekerja, kenapa kita perbatas masing-masing alokasi kerja mereka. Sehingga tetap seperti biasa tetap bekerja, ada tidak ada covid mereka tetap semangat.

Dan terakhir, saya menyarankan karena waktu berjalan terus, agar KLHK juga mempersiapkan karena terutama adalah Karhutla. Nah, ini jangan sampai kita lewat daripada, luput dari masalah COVID akan tetapi Karhutla yang sebentar lagi dalam kondisi suhu dan lain-lain ini akan terjadi.

Saya kira itu saja Ibu Menteri, mudah-mudahan kita sehat semua. Saya dengar suara Ibu Menteri agak pilek tadi, mudah-mudahan sehat selalu pada seluruh jajarannya. Sehat selalu buat kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Demokrat.

Pak Suhardi Duka, setelah itu siap-siap yang mewakili Fraksi NasDem Ibu Juli.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi.

Yang saya hormati Bapak Ketua bersama dengan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Ibu Menteri KLHK bersama dengan seluruh jajaran Eselon I.

Saya sangat memahami bagaimana sulitnya merefocusing anggaran yang awalnya Rp9,3 triliun tiba-tiba ditarik menjadi Rp7,7 triliun. Di lain sisi kita pun disuruh untuk lebih focus kepada dua hal, yaitu untuk pencegahan covid-19 dan juga adalah memastikan bahwa masyarakat masih bekerja dan bisa makan.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri saya setuju karena telah melakukan pembagian anggaran yang menurut saya cukup rasional. Satu sisi secara internal sudah menjaga jajaran Kementerian KLHK untuk bisa lepas atau tidak akan terdampak dari COVID-19 dengan peningkatan daya tahan tubuh dan lain-lain sebagainya. Tentu juga kita ingin agar Anggota Dewan juga bisa demikian.

Yang kedua, dalam mengalokasikan untuk stimulus dalam peningkatan padat karya, saya juga setuju. Yang khusus untuk KLHK saya sependapat dengan teman-teman sebelumnya yang tadinya motor sampah tidak dialokasikan lagi, ya sekarang ini bukan lagi motor sampah tetapi motor semprot untuk kita gunakan di lingkungan-lingkungan yang terkena covid. Khusus juga untuk KLHK, saya juga ingin kembali menekankan bahwa memang perlu kita usulkan untuk kantong-kantong mayat. Kemudian tempat penyimpanan APD bekas yang ada di rumah sakit, karena ini jelas tempat penyebaran virus COVID-19. Saya dorong ini supaya anggarannya diperbanyak, bisa juga kita menyumbang ke rumah sakit-rumah sakit, sehingga dengan demikian terjamin bahwa apa yang dikatakan Ketua tadi eks APD itu tidak menyebar virusnya.

Kemudian saya yang terakhir, kembali mengingatkan yaitu pengawasan impor sampah harus diawasi karena bukan hanya sampah lagi yang akan diimpor tetapi juga penyakitnya yang akan masuk. Terakhir CSR, apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi, saya support pengusaha-pengusaha itu jangan sendiri tetapi membagi-membagi CSR-nya ke 34 provinsi tentunya.

Saya kira demikian Ibu, saya setuju apa yang Ibu lakukan.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ini masalah CSR dari pengusaha ini sudah dirumuskan bahkan sudah dibentuk tim. Nanti mungkin penyalurannya menyertakan juga Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang mewakili Fraksi Nasdem ternyata Bapak Hasan tadi.

Silakan Bapak Hasan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri dan segenap jajaran yang saya hormati,
Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Bagaimana tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, sudah cukup rinci dan cukup jelas. Tinggal bagaimana mengimplemetasikan dan saya berharap Ibu Menteri ini melakukan prioritas, rakyat hari ini perlu saya sampaikan kepada Ibu Menteri dan telah disampaikan oleh teman-

teman pusat ini seakan-akan hanya mampu bicara, interupsi, dan perintah. Implementasi untuk berbagi, berbagi anggaran, berbagi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada rakyat ini belum ada sharing yang jelas, sehingga para Gubernur, para Bupati, dan Walikota serta Kepala Desa ini sudah cukup bahu membahu melayani rakyat, rakyat hari ini sekali lagi perut bukan otak lagi. Antisipasi bagaimana rakyat di Republik yang santun ini tetap terpelihara tidak pada menjarah, ini sudah ada indikasi menjarah dan seterusnya.

Yang kedua, CSR sembako. Perhutani berapa minggu yang lalu telah melakukan bagian kepada masyarakat di seluruh hutan di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat, namun isi dari sembako itu saya selalu Pimpinan Komisi IV DPR RI berharap, isinya itu ada sinkronisasi antara kementerian. Contoh suatu misalnya, Ibu Menteri melakukan pembagian sembako bagaimana isinya itu ada ikan, karena saya di Dapil ini langsung berhadapan dengan nelayan. Nelayan hari ini panen ikannya luar biasa, namun siapa yang membeli ini sebuah pertanyaan dan karena rakyat daya belinya sudah menurun otomatis Pemerintah berkewajiban membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan.

Dua hal inilah barangkali sekali saya berharap ada prioritas yang segera dilakukan oleh Kementerian sebagai mitra Komisi IV DPR RI. Yang kedua, isi dari sembako itu ada sinkronisasi antar kementerian sebagai mitra Komisi IV DPR RI.

Terima kasih Bapak Ketua.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Pimpinan.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Golkar, Kang Dedi Mulyadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Ibu Menteri, Bapak Ketua, Pimpinan dan para Anggota.

Saya menyampaikan dua hal saja, yang pertama dari sisi tugas KLH sebenarnya hari ini KLH terbantu tugasnya karena pencemaran udara semakin menurun, jalan-jalan mulai kosong, pabrik-pabrik agak menurun produksinya jadi lingkungan hidup semakin baik sekarang, tetapi dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat sangat tinggi.

Ada dua hal, yang pertama saya melihat bahwa ketika kota sudah bermasalah maka orang lari ke desa dan ke hutan-hutan. Dan kalau sampai

desa nanti terpapar massif maka sebenarnya kita tidak punya harapan. Untuk itu, saya mohon penjagaan di areal-areal hutan, baik areal produksi maupun non produksi itu dilakukan pengetatan pengamana dengan kelengkapan yang cukup dan memadai, sehingga bisa mendeteksi apakah yang lewat dan masuk ke areal itu sudah positif atau belum. Itu yang pertama.

Yang kedua, sampai saat ini yang masih bekerja tidak pernah berhenti adalah petugas pemungut sampah, baik di tingkat RT, tingkat RW, maupun pada level yang lebih tinggi di kota dan kota-kota besar. kelengkapan mereka sangat minim, padahal mereka bekerja itu secara terus menerus apalagi sekarang dengan di rumah saja itu produksi sampah semakin meningkat, sampah rumah tangga. Untuk itu, saya mohon mendapat perhatian khusus untuk para petugas pemungut sampah, baik petugas yang non formal yang digaji secara sukarela oleh masyarakat maupun yang sudah bekerja di kantor Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi karena seringkali daerah-daerahnya tidak punya perhatian yang tulus kepada mereka. Kalau besok petugas sampah ini terpapar maka sudah terbayang penumpukan sampah akan terjadi di mana-mana dan ini akan menjadi problem besar.

Itu saja barangkali dan selain juga mendapatkan perhatian dalam bentuk kelengkapan keselamatan bekerja mereka dari *COVID* juga kesejahteraan mereka. Ada bantuan-bantuan untuk peningkatan gizi, kemudian kebutuhan kalori mereka dari Kementerian Lingkungan Hidup minimal melalui para Anggota DPR RI di Dapilnya masing-masing.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang mewakili Fraksi PKB, Mbah Tarom silakan.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian KLHK.

Kesempatan yang berbahagian ini pada dasarnya saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan dipersiapkan oleh Kementerian KLHK kaitannya dengan menghadapi *COVID-19*. Kemudian kami dari kegiatan-kegiatan tersebut mengharapa yang matrik yang diinformasikan kepada DPRD. Kami yang ada di Dapil saat ini nanti akan menyesuaikan dalam rangka ikut mengawal dan mengawasi kegiatan KLHK yang ada dilapangan ini tepat sasaran atau tidak. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya sependapat bahwa motor tempel ini harapan saya tetap diadakan, karena ini sangat penting terlepas menghadapi covid-19 ini juga sangat membantu para pengambil sampah yang ada di jalan-jalan kecil.

Kemudian saya juga sependapat dengan Bapak Hasan, bahwa nanti kalau terjadi yang terjelek kemungkinan akan terjadi seperti kasus 98 bahwa terjadi mohon maaf terjadi penjarahan, ini juga harus benar-benar diantisipasi para ADM, KPH yang ada di lapangan ini benar-benar menggerakkan tentunya untuk menghindari itu KLHK harus memperhatikan para petani hutan kita yang saat ini juga sudah taat kepada Pemerintah, yaitu physical distancing untuk tidak keluar. Ini yang harus direspon juga oleh KLHK.

Mungkin ini Bapak Ketua, yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Ibu Ema yang mewakili Fraksi PPP.

Silakan Ibu.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri beserta jajarannya.

Ada beberapa hal dari kami yang ingin saya sampaikan, pertama-tama saya mengapresiasi kepada KLHK terkait upaya penyelamatan harimau Sumatera di tengah pandemic COVID-19. Ini merupakan salah satu bagian dari pelestarian satwa dan penjagaan kawasan konservasi. Tanggapan kami mengacu kepada *refocusing* kegiatan Ditjen KSDAE bahwa kegiatan penjagaan kawasan konservasi bersama MMP (Masyarakat Mitra Polhut) dan pencegahan kebakaran dengan MPA harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Meskipun dalam kondisi pandemic saat ini dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Kita harus lebih waspada dan jangan lengah yang mengakibatkan situasi ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, akibatnya dapat muncul masalah baru lagi. Selanjutnya yang lebih penting lagi adalah perhatian bantuan sosial yang untuk kesejahteraan MBT dan MPA dalam masa pandemic COVID-19 seperti ini.

Yang kedua, terkait dengan sosialisasi dan edukasi perihal penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan setiap daerah harus lebih fokus dan serius terutama daerah-daerah yang status kesehatannya dalam proses persiapan apakah ada kendala dalam persiapannya, terus bagaimana tindaklanjutnya dan sebagainya. Diharapkan penanganan dan pengolahan limbah B3 infeksius ini lebih serius agar tidak berdampak kepada lingkungan hidup dan kesehatan manusia juga.

Yang terakhir Ibu Menteri, mengingat sekarang sudah memasuki pertengahan bulan April, berdasarkan prediksi BMKG di beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus 2020. Peran Sangat sangat penting untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami menilai sebaiknya tidak terlalu banyak yang dipangkas terkait refocusing yang penghematan Badan Restorasi Gambut. Kami menilai alternatif pertama, yaitu besaran anggaran untuk kegiatan penanganan COVID-19 sebesar Rp14,5 miliar dan penghematan sebesar Rp19,7 miliar.

Itu Ibu Menteri yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Bapak Johan Rosihan yang masih di NTB.

Silakan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua yang saya hormati, Para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang terhormat.

Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri yang sudah melaksanakan hail rapat kita sebelumnya, yaitu melakukan realokasi refocusing terhadap anggaran KLHK ini.

Yang berikutnya, karena kita sudah merevisi anggaran secara umum sudah menyepakati itu, karenanya saya ingin memberikan beberapa catatan saja. Yang pertama, soal perhutanan sosial saya mengingatkan kepada Ibu Menteri bahwa KLHK sudah menetapkan target 12,7 juta hektar. Sementara realisasinya baru 2,8 juta hektar, sementara target KLHK itu 1,8 juta per tahun. Nah, catatan di Dapil saya di Sumbawa itu baru ada seluas 5.169,54

hektar sebanyak 37unit SK yang terdiri dari 1.452 kepala keluarga Ibu Menteri. Karenanya dalam *refocusing* ini saran saya supaya perhutanan sosial ini harus diberikan fokus. Kalau misalnya sampai sekarang *refocusing* yang saya maksud itu adalah supaya diberikan peningkatan baik dari sisi mempermudah ijinnya atau diperkuat anggarannya. Kalau kita tidak ditambah ya diperkuat anggarannya, karena para ahli mengatakan bahwa inikan bukan hanya di Indonesia *COVID* ini tapi seluruh dunia. Paska *COVID* nanti negara yang bisa menjaga sumber daya alamnya itulah yang kemudian yang menang.

Nah, kita sudah sepakat semua, Presiden sudah mengatakan bahwa kita ingin menjadi pemenang pasca *COVID* ini. Karenanya yang harus menjadi perhatian siapa yang bisa menjaga hutan, siapa yang bisa menjaga sumber daya alam ini maka Insya Allah kita akan menjadi pemenang. Karenanya saya sarankan kepada Ibu Menteri, supaya *refocusing* kita itu fokusnya disitu, karenanya kesejahteraan, kesehatan, gizi, para *stakeholder* hutan itu tidak boleh kita abaikan. Karenanya Ibu Menteri, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita jangan terpaku pada data-data yang ada di Kementerian Sosial. Kita punya data sendiri, kita tahu berapa pekerja hutan kita, berapa petugas-petugas KPH kita, berapa petugas-petugas hutan kita itu yang kita fokuskan.

Karena itu Pak Ketua, sepakat saya dengan apa yang diusulkan oleh Bapak Hasan tadi itu tentang isi sembako itu. Usul saya Bapak Ketua, setelah ini kita rapat kordinasi antar Menteri di Komisi IV DPR RI, karena menteri-menteri di Komisi IV DPR RI inikan bagian produksi Pak Ketua. Kalau mau isi ada Menteri Perikanan dan Kelautan kita. Kalau kita mau isi telur ada Menteri Pertanian kita. Karenanya untuk sembako masyarakat ini yang melibatkan Anggota ini perlu kita melakukan rapat kordinasi 3 menteri yang ada di Komisi IV DPR RI untuk penanganan *COVID-19*, terutama dari sisi menjaga kesehatan masyarakat kita supaya sembakonya itu yang berkualitas baik dari sisi jumlah maupun gizinya.

Yang berikutnya, yang kedua adalah soal yang banyak disebut oleh teman-teman tadi soal Karhutla. Refocusingnya juga harus disitu Ibu Menteri saran saya, karenanya jangan anggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan ini terlalu banyak dikurangi. Jangan sampai masyarakat kita itu sudah kena *COVID*, setelah *COVID* kena asap lagi. Berilah sedikit masyarakat kita ini waktu senggang untuk bernafas lega.

Mungkin itu dua hal Pak Ketua, karena adzan juga sudah di Lombok ini saya sekalian ijin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Kanjeng Bapak Darori silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri, Bapak Ketua dan para Eselon I yang kami hormati.

Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa hasil daripada *refocusing* realokasi pada prinsipnya sudah cukup. Namun, perlu ada pencermatan karena kalau *COVID-19* ini berlanjut, dampak daripada masyarakat itu pengalaman tahun 1998 itu akan membuka hasil hutan. Maka anggaran-anggaran yang terkait dengan pengamanan hutan, baik untuk konservasi juga mengenai kebakaran, juga mengenai penegakan hukum ini menjadi perhatian. Karena Kementerian LHK ini bukan sebagai kementerian pelayanan saja tetapi juga pemangku kawasan, menjahga kawasan. Ini yang perlu diperhatikan.

Terus yang kedua juga, dalam *refocusing* ini saya sangat prihatin juga karena menurut pidato Presiden kemarin kemungkinan ada pemotongan lagi gitu. Maka kepada Kementerian LHK perlu diperhatikan, ini luar biasa ini kondisi keuangan negara baru kali ini selama saya pernah tugas kehutanan 20 tahun sebagai eselon I dan eselon II tidak pernah ada tunjangan hari raya itu eselon I dan II itu dihapus itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kritis anggaran ini cukup, maka saya minta ini menjadi perhatian kepada Ibu Menteri untuk mengkaji kembali kemungkinan pergeseran-pergeseran tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, bisa dilaksanakan.

Terus yang selanjutnya, juga kami sampaikan bahwa perlu dievaluasi pelaksanaan reforma agraria dan sosial yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Yang selanjutnya dalam hal teknis, kami mengingatkan kepada para Eselon I yang menangani Bang Pesona ini bagus, yang selama ini 60%-40% perbandingannya ternak besar ini akan dilakukan oleh ternak ayam dan itik ini. Dan saran saya ini pembelian ayam dan itik itu dari lokal, jangan terjadi di Kementerian sebelah beli ayam bertelur, kata Bapak Ketua, telurinya tidak ada bulunya juga tidak nampak. Nah, ini perlu jadi perhatian Bapak Ketua.

Terus yang kedua, KBR ini Ibu Menteri, ini waktunya tinggal 7 bulan. Kami sarankan yang mengelola KBR ini karena bibit mungkin bulan Desember dan Januari kemarau, maka kami harapkan ada tambahan biaya pemeliharaan bibit sehingga bibit itu tertanam dengan baik.

Terus RHL tadi disampaikan oleh teman juga bibit RHL itu hanya dikurangi 500, karena waktu kegiatan RHL ini sangat pembibitan tinggal 6-7 bulan ini, maka saya sarankan untuk tahun ini cukup pembibitan tetapi polanya multi years dengan tanaman. Sehingga yang melaksanakan bibit dan tanaman reboisasi itu satu paket, sehingga kalau Desember nanti yang melaksanakan pembibitan sekaligus bisa memelihara bibit untuk melakukan penanaman ini.

Nah, ini juga kami sampaikan mengenai masalah CSR, kami mohon kepada Ibu Menteri dan teman-teman untuk mengantisipasi kemungkinan dampak dari covid-19. Prioritaskan pembagian CSR itu di sekitar kawasan hutan. Ini yang perlu kami sampaikan, jadi mudah-mudahan teman-teman yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, baik masalah mengenai BRG dan lain-lain.

Dan yang terakhir soal Perum Perhutani Ibu Menteri, Perum PERHUTANI kami sudah keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat terakhir saya terkejut apakah ini perintah Dirut atau Dirut tidak tahu di hutan lindung penyangga Gunung Tangkuban Perahu sekarang ada penebangan pohon pinus yang besar-besar bahkan digunakan untuk membuat pondok-pondok yang sebetulnya tidak produktif, tidak professional itu. Mohon penjelasan apakah memang ini ada ijinnya atau ada penugasan. Kalau memang tidak ada mohon ini dihentikan, karena di kiri dan kanan jalan arah ke Tangkuban Perahu itu luar biasa penebangannya oleh petugas kehutanan di lingkup Perum Perhutani. Dan juga di Jawa Barat Ibu Menteri, masi massif pungutan liar mengenai hutan wisata alam, wisata alam itu pungutan liar oleh oknum-oknum masih banyak. Mohon ditertibkan dan sebaiknya ini diterbitkan ijin bagi yang berminat.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kanjeng atas masukannya.

Tadi saya minta langsung kepada saudara Dirjen Gakkum untuk mengecek perihal pohon pinus di kawasan Tangkuban Perahu yang ditebang. Tinggal diperintahkan kepada petugas lapangannya.

Selanjutnya Ibu Julie dari Fraksi Partai NasDem.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Saya hanya sedikit saja melanjutkan dengan tadi yang saya punya Kakak Hasan bicara. Kalau mau memberikan Bansos itu saya meminta untuk supaya bisa ada perekonomian di daerah pun tetap hidup. Jadi jangan hanya Bansos bawa dari luar diberikan kepada khususnya misalnya Nusa Tenggara Timur, karena saya dari Dapil situ. Jadi jangan hanya itu, tetapi karena kayak seperti Ibu Menteri dengan yang lain bisa berkolaborasi seperti kayak kemarin kami bicara dengan Menteri KKP. Jadi kita kan ikan luas sekali dan banyak

sekali NTT, bisa untuk pemberian itu beli ikannya di para nelayan kita dengan juga semako-sembakonya bisa beli di petani kita. Sehingga bukan hanya Bansos satu kali saja tetapi ada sesuatu ekonomi perputaran disitu.

Saya rasa itu saja dari saya Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang mewakili Partai Golkar, Bapak Alien Mus.

Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Siap Ketua.

Baik, terima kasih Ketua.

Ibu Menteri dan jajarannya dan Komisi IV DPR RI yang saya hormati.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Saya ingin menyampaikan dengan program-program yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi. Ada beberapa hal yang saya ingin perjelaskan lagi atau tegaskan bahwa memang dalam keadaan ini kita dihadapkan dengan virus *COVID-19*. Tapi kita juga harus memberikan atensi bahwa sebentar lagi di Indonesia khususnya kita di bulan 6, 7, 8, 9, itukan kita dihadapkan dengan kemarau yang mungkin juga akan panjang seperti tahun kemarin. Jadi saya berharap bahwa tadi saya melihat ada pemotongan anggaran di BRG, tapi kan kita juga harus melihat bahwa pemotongan-pemotongan anggaran harus juga melihat standarnya. Makanya itu saya mungkin mau memberikan masukan bahwa Ditjen-Ditjen yang terkait dengan BRG misalkan itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau memang kemarau panjang dan terjadinya kebakaran itu pun juga kan kita semua di Jakarta, di Sumatera, di pulau-pulau besar yang biasa yang terjadi kebakaran hutan akan berdampak juga asap tersebut dan juga di negara-negara tetangga yang lain. Dan juga kalau apabila Insya Allah ini kita harapkan bahwa *COVID-19* bisa segera selesai dalam 3 bulan ini Insya Allah, tapi kalau memang tidak selesai dalam 3 bulan dan kita dihadapi dengan kebakaran lagi lahan apa yang kita harus perlu tindaklanjuti. Saya pikir ini atensi yang paling utama.

Terus juga kita melihat beberapa program bantuan dan sebagainya itu juga kan kita harus melihat daerah-daerah yang betul-betul Ibu Menteri harus perhatikan, karena memang tadi ada penebangan, saya juga ingin menyampaikan walaupun ini tidak terlibat langsung tapi KLH juga harus mengetahui bahwa kemarin di Pulau Obi itu di Halmahera Selatan itu ada TKA yang dimasukkan oleh perusahaan Harita Group itu tenaga asing masuk dengan kapal pribadi tanpa melewati pesawat atau kapal-kapal yang dipergunakan oleh daerah-daerah tersebut. Ini juga harus kita memberikan

atensi kepada sebagai penanggung jawab lingkungan hidup yang ada di daerah-daerah juga.

Terus Dirjen PSLB3 ini juga kita harus atensi juga karena jangan sampai impor sampah medis masuk lagi ke Indonesia yang kita tahu sendiri mungkin tertular dengan *COVID-19*. Jangan sampai sampah-sampah medis itu bisa masuk lagi ke Indonesia, di karenakan memang untuk sampah medis ini kita tahu sendiri *COVID-19* sangat bertahan, sangat kuat 5 sampai 8 hari terhadap sampah-sampah medis tersebut, plastic misalkan seperti jarum suntik misalkan, tempat infus dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ketua.

Terima kasih.

Semoga selalu sehat Pak Ketua, yang selalu hadir memimpin rapat di Komisi IV DPR RI.

Semangat.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Mbak Riezky Aprilia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi, Ibu Menteri Bapak Sekjen, BRG dan para Dirjen, semoga dalam keadaan sehat.

Saya pertama, ingin menyoroti permasalahan tadi yang mungkin beberapa kali dibahas terkait dan agak kaget juga saya terkait motor sampah, berarti itu mungkin terkait dengan PSLB3. Saya kemarin Reses itu baru kembali dari TPA Sukawinata dan saya berinteraksi langsung waktu itu, mohon atensinya juga kepada Ibu Dirjen, bahwa tolong dipertimbangkan kembali dan apabila memang tidak bisa dipertimbangkan solusinya seperti apa terkait pengolahan sampah apalagi sampah dari daerah-daerah perkotaan yang pertama, karena itu agak riskan. Saya takutnya malah musibah besar akan menjadi permasalahan kedepannya apabial motor sampah ini juga tidak dimaksimalkan, bank sampah juga tidak didampingi dan juga terkait dengan pengelolaan sampah ini juga tidak dimaksimalkan.

Nah, saya sih secara pribadi mengusulkan agar terkait dengan pengelolaan sampah ini mungkin dipertimbangkan kembali untuk penambahan. Karena sampah medis hari ini saya lihat dimana-mana sampah masker itu luar biasa, walaupun Pemerintah memberikan himbauan untuk masker kain juga tetap saja masker yang sekali pakai tetap digunakan oleh banyak masyarakat.

Yang kedua, kepada terkhusus BRG saya termasuk daerah yang selalu menyumbang asap apabila kebakaran hutan di wilayah saya, wilayah Sumatera terkhusus, Riau, Jambi. Dan saya melihat bahwa dirinciannya itu BRG dikurangi dari 312 menjadi 233. Riau, Kalteng, Papua tapi dirinciannya ada Riau, Kalteng, Papua, tetapi Sumselnya tidak ada. Padahal setiap kebakaran itu saya harus mengakui penyumbang asap terbesar untuk dihirup oleh Indonesia ini pada saat kebakaran hutan. Jadi saya mohon maaf Pimpinan, saya ingin bila perlu tolonglah di up 30% itu untuk BRG. Karena BRG juga bukan selain masalah kebakaran hutan, hari ini kontribusinya terhadap masyarakat sekitar gambut itu yang mana banyak daerah miskin itu terbantu hari ini karena ada kopi Liberikanya saya sudah lihat sendiri, saya Reses kemarin turun disitu. Jadi ada juga tanaman-tanaman sayuran yang bisa membantu desa terdekat diluar wilayah gambutnya juga. Jadi bisa saling supporting karena eksodus dari kota ke desa hari ini luar biasa.

Kemudian tadi menguatkan juga yang disampaikan oleh Pak Slamet dari PKS, bukan Slamet anaknya Ibu Alien. Teknis *e-learning* itu betul, tolong dipertimbangkan itu karena wilayahnya terkait teknisnya, teknis penyelenggaraannya saya sangat *support* 100%, bahwa ini pendidikan ke masyarakat, akan tetapi teknisnya terkendala dengan teknologi Ibu Menteri, teknologi yang betul sinyal ini biar jelas. Jadi jangan sampai menjadi kendala dan akhirnya *wasting time*, *wasting cost* yang pasti. Jadi pemetaannya kalau kita dari kementerian juga *clear*.

Itu saja dari saya Ibu Menteri, saya pribadi mensupport program-program adri KLHK. Dan yang pasti tadi kembali lagi tolong atensinya bisa buat terkait limbah medis jangan sampai dari *COVID-19* nanti menjadi bakteri baru terkait pengolahan sampah itu.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Bapak Muslim dari Fraksi Demokrat.

Silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua dan teman-teman Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri beserta jajarannya.

Ibu Menteri, pertama tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Menteri dalam rangka relokasi anggaran. Kalau saya lihat secara menyeluruh inikan sangat komprehensif dari semua Dirjen terkait. Namun, ada beberapa hal Ibu Menteri yang menjadi sorotan khususnya menjadi pertanyaan tentunya dalam rangka pelaksanaan dilapangan. Disini memang saya melihat ada di Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan. Disini saya lihat yang lain sudah, cuman mungkin ada yang perlu saya pertanyakan pemberian bantuan ekonomi produktif dan Bang Pesona kepada kelompok usaha perhutanan sosial ini mungkin bisa digambarkan seperti apa Ibu Menteri.

Kemudian yang kedua Ibu Menteri, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Dirjen DAS. Saya lihat Dirjen ini anggarannya sekitar 2,7 setelah ada penghematan kurang lebih 2,2. Tentu dalam hal ini yang menjadi sorotan Ibu Menteri kita tahu di Aceh itu sekitar 50% itu DAS itu hampir semuanya sudah rusak, salah satu faktornya adalah *illegal logging* dan juga penebangan hutan secara liar. Tentu dalam hal ini saya berharap Ibu Menteri ada penguatan, salah satu mungkin masalah Polisi Kehutanan. Saya melihat keberadaan Polisi Kehutanan ini sangat minim sekali. Saya melihat tadi baru jumlah sekitar 657 orang, tentu dalam hal ini, ini momentum buat Ibu Menteri tentu bagaimana dalam rekrutmen Polisi Kehutanan ini sangat penting. Kenapa saya lihat, ini masukan saya dilaporkan oleh berbagai masyarakat ini terjadi *illegal logging* di tengah hutan ini luar biasa, ini tidak termonitor Ibu Menteri. Mudah-mudahan ini di dengar Ibu Menteri, tolong DAS-nya juga dimaksimalkan.

Terakhir berkaitan dengan CSR tadi sebagai mitra daripada KLH. Tentu kita harapkan salah satu yang kita sepakati, salah satu mungkin pembagian sembako. Dalam konteks pembagian sembako ini tentu kita harapkan ini seperti apa dan mekanisme seperti apa, ini harus betul-betul dimaksimalkan dalam pelaksanaan dilapangan nanti. Sehingga target yang kita harapkan betul-betul mencapai kepada tujuan yang kita inginkan. Ini beberapa hal Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua yang saya hormati,
Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi IV DPR RI yang saya cintai,
Dan khususnya kepada Ibu Menteri yang saya banggakan beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya sependapat dengan teman-teman Ibu Menteri, bahwa pertama kali apresiasi kepada Ibu Menteri yang telah memfokuskan beberapa kegiatan khususnya difokuskan kepada ketersediaan pangan. Nah, ini sangat penting sekali, jadi mohon sekali lagi perlu diperhatikan para pengelola hutan kita terutama buruh-buruh di kehutanan yang merasa sekarang ini dengan adanya *lockdown* akan mengalami kesulitan memperoleh pangan khususnya.

Nah, terutama saya ingin mengungkapkan kepada Ibu Menteri bahwa kita bolehlah global thingking tapi kita harus aplikasi di lokasi itu dengan baik. Nah, jadi yang saya inginkan tadi sesuai dengan anjuran dari Ibu Gubernur dari NTT bahwa pada saatnya sekarang harus memprioritaskan produksi-produksi lokal yang dihasilkan oleh daerah setempat. Banyak sekali madu-madu, jadi bukan madu istri muda Bapak Ketua, tapi madu yang dihasilkan oleh Perhutani dengan beraneka ragam sesuai dengan kearifan lokal setempat itu tidak bisa dibeli oleh masyarakat dan juga tidak bisa dipasarkan oleh para pengusaha setempat. Nah, untuk itu saya berharap LHK dalam hal ini bidan SDM-nya bisa membantu untuk kelanjutan perekonomian lokal yang berbasis kearifan lokal setempat.

Yang kedua Ibu Menteri, di Cianjur baru aja ada terjadi longsor di daerah Sukanegara ini juga perlu perhatian. Nah, untuk itu perlu di-push lagi tentang ketersediaan bibit-bibit sebagai penghalang banjir. Karena masyarakat setempat itu tidak menguasai bibit-bibit apa yang harus ditanam sehingga asal menanam saja yang tidak menyerap air di lingkungan setempat.

Nah, kemudian yang kedua tentang keberlanjutan padat karya. Mungkin dengan adanya himbauan dari pusat tentang pemisahan, tentang lockdown. Jadi Ibu Menteri, harus juga membuat skema-skema bagaimana padat karya itu bisa dikerjakan tapi memperhatikan kesehatan mereka.

Yang berikutnya adalah tentang tadi sudah diungkapkan tentang limbah. Nah, ini perlu perhatian dan juga kesejahteraan dari para pengumpul sampahnya. Jadi banyak sekali problem yang dihadapi di masyarakat karena tidak adanya ketersediaan yang memadai untuk pengangkutan sampah dan juga peralatan yang dimiliki oleh pengangkut-pengangkut sampah.

Yang terakhir, saya ingin sekali ada kordinasi tentang yang belum disoroti oleh teman-teman tentang Litbang. Litbang Pertanian ini kalau bisa Ibu Menteri, berkordinasi dengan Litbang-Litbang setempat, karena tadi visi dan misi LHK bagus sekali, selain untuk kedaulatan pangan adalah kedaulatan energy. Nah, *energy alternative* ini banyak sekali dihasilkan dari tanaman-tanaman hutan yang belum disosialisasikan kepada masyarakat tentang kegunaannya bisa menggantikan *energy alternative*. Nah, mohon ada kordinasi yang baik karena saya pikir banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah meneliti, yaitu diantaranya DPTP, pertanian tersendiri juga Litbang Kehutanan dan yang tidak kalah penting LIPI.

Nah, ini kalau ada kordinasi yang baik Ibu Menteri, hutan-hutan sosial ini bisa kita manfaatkan sehingga ekonomi untuk *COVID-19* ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya pikir ketahanan nasional sangat tergantung sekali dengan ketahanan pangan. Nah, pangan itu juga dari tenaga kerja.

KETUA RAPAT:

Cukup Ibu Endang?

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Charles, silakan Bapak Charles.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Ketua.

Ketua dan rekan-rekan dari Komisi IV DPR RI, serta Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jajaran.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang pertama, kami saya pribadi mengapresiasi apa yang dipaparkan oleh Ibu sangat komprehensif dan benar-benar telah melihat dalam kondisi yang memang tidak menguntungkan. Dari anggaran 9,3 triliun menjadi 7,7 triliun bagi saya itu sebuah pukulan yang sangat berat. Dan saya berharap tidak lagi diturunkan apalagi kemudian dikurangi, saya berharap ini bisa dipertahankan syukur-syukur bisa ditambahi anggaran tersebut.

Saya ingin melihat Ibu Menteri, yang pertama soal Ditjen Gakkum yang mengalami penurunan lumayan ini. Menurut saya memang penegakan hukum setelah pasca *COVID-19* ini, ini akan menjadi sebuah tantangan yang berat buat Ibu dan jajaran di Ditjen Gakkum ini. Menurut saya memang harus ada kordinasi penuh yang harus dilakukan oleh Ditjen Gakkum harus kerja-kerja yang lebih smart, kemudian berkordinasi penuh dengan jajaran, baik Kepolisian, kemudian juga yang tidak kalah bahkan adalah dengan Pemda, baik Pemda tingkat I, maupun Pemda tingkat II. Menurut saya ini mau tidak mau memang harus ada kerja-kerja yang lebih pas yang dilakukan oleh Gakkum menghadapi pengurangan anggaran ini.

Yang kedua, saya melihat soal Ditjen Kebakaran Hutan dan Lahan yang juga turunkan anggarannya sekitar 18,19 miliar lebih. Menurut saya ini juga sebuah hal yang menjadi warning besar Ibu, karena apapun kita lihat 2019 yang lalu kita sudah melihat sebuah hal yang berat bagi kita, dimana Ibu sudah bekerja sangat baik sebelum 2019 untuk penanganan kebakaran.

Namun, kita lihat dengan berbagai halnya juga bahwa kebakaran hutan ini kemudian kemarin memang menjadi sebuah hal yang kita hadapi.

Saya berharap masalah kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sebuah hal yang benar-benar tolong sekali Ibu kembali bicara dengan Pemerintah-Pemerintah Daerah jangan sampai mereka kemudian menghadapi situasi ini kemudian mereka lepas tangan dan kemudian memberikan semuanya hanya kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ibu. Lebih baik kemudian berbicara sekarang daripada kemudian setelah kejadian baru hal-hal tersebut yang dilakukan.

Yang terakhir, saya juga melihat soal Ditjen Pengendalian Sampah Limbah dan Bahan Beracun yang berbahaya ini. Ibu Menteri dan jajaran, saat ini tentang medis yang bekerja menangani COVID-19 ini sedang menggunakan seluruh peralatan kesehatan untuk menangani pasien. Oleh karena itu, limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan oleh tenaga medis harus bisa dicover dengan jelas dan aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melihat dengan adanya penghematan anggaran apakah tidak berpengaruh terhadap kinerja penanganan limbah B3 yang saat ini semakin banyak digunakan untuk menangani pasien COVID-19.

Mengenai persoalan COVID-19 ini baiknya kita menanganinya dari hulu ke hilir Ibu. Tentu yang tidak kalah penting adalah menangani permasalahan limbah yang digunakan dalam perawatan pasien atau yang digunakan dalam keperluan medis ini. Jadi saya berharap sekali karena sekarang yang namanya APD dan lain-lain ini menjadi sebuah hal yang massif jumlahnya. Ini juga sekali lagi harus ada kordinasi yang sangat jelas dan kami dari Komisi IV DPR RI sangat mendukung sekali kerja-kerja Ibu untuk menangani itu semua.

Saya pikir itu Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, serta Ibu Menteri. Sekali lagi support buat Ibu dan tim untuk bekerja lebih baik kedepan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Bapak Hermanto dari Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota, Ibu Menteri dan jajarannya bersama BRG.

Saya ingin mengingatkan Ibu Menteri, bahwa prinsip anggaran APBN ini adalah *Effect*, artinya bahwa anggaran yang kita susun itu adalah lebih banyak untuk membangun basis ekonomi masyarakat. Nah, saya melihat bahwa pada asatnya sekarang ini, ini harus kita gencarkan efektifitas daripada anggaran-anggaran yang berbasis masyarakat. Terutama terkait dengan soal program-program bantuan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

Nah, pada saat ini kita menghadapi *COVID* dan kita diranah ini menghadapi masyarakat yang marginal. Yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi, baik dari rentan ekonomi maupun juga rentan kesehatan. Satu hal saya mengunjungi daerah hutan kaki Gunung Kerinci Ibu Menteri. Saya kemarin waktu itu mengunjungi masyarakat hutan di kaki Gunung Kerinci. Sepanjang perjalanan saya ke arah sana itu, itu jelas ada efek dari mobilitas ekonomi masyarakat hutan dan juga mengalir ke daerah-daerah yang lain ini mengalami keterlambatan. Nah, ini harusnya Ibu Menteri memperhatikan bagaimana supaya produk kehutanan yang dihasilkan oleh masyarakat hutan dan masyarakat sekitar hutan ini menjamin supaya aliran barang produksi itu terjamin secara baik, sehingga bisa memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Kemudian terkait soal sinyalemen bahwa tadi beberapa Anggota menyebutkan akibat *COVID-19* ini sudah terjadi bentuk-bentuk kejahatan di masyarakat. Nah, bila informasi ini valid maka bisa terjadi eskalasi kejahatan bukan hanya saja di sector perkotaan tetapi bisa juga terjadi di sector masyarakat desa dan kehutanan. Dimana disitu bisa terjadi illegal logging, illegal logging ini adalah kejahatan yang luar biasa dan ini juga harus dalam pemantauan dan pengawasan dari KLHK, melalui pengawasan hutan yang dalam hal ini diamanatkan kepada Polisi Hutan ini harus diperkuat Ibu Menteri. Karena bisa jadi jika eskalasi itu terjadi, kejahatan yang hampir kita temui setiap hari dan apalagi peluang itu saat sekarang ini.

Kemudian yang terakhir Ibu Menteri, kemarin pada waktu Rapat Kerja yang lalu saya ingatkan bahwa efek daripada *COVID-19* ini terdapat banyak sampah yang kita sebut dengan sampah infeksius. Nah, ini kalau kita lihat dampaknya sekarang inikan sudah nampak nyata. Oleh karena itu, untuk Sumatera Barat itu Ibu Menteri sudah mengagendakan program pengolahan sampah B3. Saya minta supaya pengolahan sampah B3 ini segera direalisasikan, karena sekarang ini Sumatera Barat itu sudah banyak tuntutan masyarakat untuk segera Pemerintah Daerah mengusulkan PSBB. Nah, ini bila PSBB artinya masyarakat Sumatera Barat ini sudah cukup tinggi dampak *COVID-19* ini. Saya minta supaya Ibu Menteri ini juga mendorong adanya bank sampah, kemudian motor sampah, dan masyarakat yang mengolah lahan-lahan sampah ini supaya ini ditunjang dengan anggaran yang cukup. Dan segera merealisasikan mana anggaran yang sudah dianggarkan oleh Ibu Menteri.

Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ternyata realisasi dari pada perhutanan sosial ini hanya sekitar 11%, yaitu hanya mencapai 2,8 juta hektar dari 12,7 juta hektar. Ini artinya, saya melihat bahwa

record dan efeknya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini saya minta supaya Ibu Menteri ini mempercepat bagaimana bisa mencapai realisasi yang baik, supaya ekonomi masyarakat bisa terbantu.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Hermanto.
Selanjutnya Ibu Nur'aeni, singkat dan jelas.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua dan rekan-rekan semua, Ibu Menteri beserta jajaran.

Pertama, tentu menyambut baik terhadap realokasi dan refocusing serta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena disini dari realokasi refocusing Kementerian KLHK sudah menggerakkan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat kehutanan khususnya. Nah, saya mendorong yang pertama agar setiap padat karya mendorong untuk lebih produktif dan lebih kepada produktif yang melibatkan sinergitas dengan Kementerian serta Pemerintah Daerah.

Dan kedua, mendorong *e-learning* ini saya sepakat *e-learning* ini harus metode dan modelnya Secara internal dan melibatkan pihak-pihak lain agar lebih efektif, efisien, dari sisi pembiayaan. Nah, difokuskan untuk segera dilakukan kluster sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kehutanan dan lain sebagainya.

Nah, kaitan dengan program motor sampah ini juga sangat penting, setuju sekali, karena kita juga butuh di wilayah-wilayah perkotaan. Bank Pesona saya kira jangan sampai dipangkas ini juga luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi juga.

Nah, dari beberapa program yang sudah diusulkan tentu kita tunggu dari sisi terawasi karena mengingat ini progress ini harus segera direalisasikan. (rekaman tidak jelas) ... Karena ini sudah mau berakhir. Saya ingin menyampaikan isu penting kaitan tentunya limbah B3 ini karena limbah B3 ini saya mengharapkan bahwa rumah sakit-rumah sakit yang ada di wilayah pertumbuhan *COVID*-nya yang cukup cepat seperti Jawa Barat, DKI dan Banten. Ini saya melihat belum ada daftar rumah sakit yang mampu mengelola limbah medis sesuai surat edaran Menteri Nomor 2 tersebut hanya beberapa rumah sakit, tentu ini menjadi miris, menjadi suatu tanda tanya besar. Disini apakah Surat Edaran Menteri Nomor 2 KLHK ini sudah

tersampaikan atau tersosialisasikan atau belum. Nah, kalau pun belum langkah apa yang harus secepatnya dilakukan, karena kalau tidak sekarang untuk dikendalikan saya menjadi kekhawatiran.

Terakhir, semua daerah yang ada di Provinsi Banten rumah sakit rujukan itu pengelolaan sampah rumah sakit itu dilakukan oleh PT. Wastek. Sejauhmana Kementerian KLHK bisa mengendalikan terhadap perusahaan tersebut dengan melakukan sosialisasikan dan melakukan investigasi terhadap pengelolaan sampah rumah sakit.

KETUA RAPAT:

Cukup Ibu Nur?

Cukup.

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang terhormat Anggota Dewan dan Pimpinan.

Tadi sudah kita putuskan jam 12.00 WIB. Saya minta persetujuan untuk diperpanjang menjadi jam 13.00 WIB.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Bapak Slamet Ariyadi.

Teman-teman semua Anggota yang terhormat, saya mohon jangan masalah motor sampah di ulang lagi, kan sudah ada yang menyampaikan sudah banyak.

Silakan Bapak Slamet.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Anggota dan Ibu Menteri LHK yang saya hormati.

Pertama, terkait dengan stimulus pengalihan kegiatan pencegahan Karhutla dalam proses melibatkan masyarakat. Kalau boleh saya sarankan kepada Ibu Menteri LHK agar kegiatan pengalihan kegiatan Karhutla lebih efektif, kami minta untuk menggandeng panitia gugus penanganan covid khususnya di area yang memiliki wilayah Karhutla. Dan yang lebih penting untuk menggandeng Anggota Komisi IV DPR RI agar juga melibatkan agar juga lebih efektif.

Yang kedua, terkait tadi Ibu Menteri menyampaikan terkait adanya badan penyuluhan dan pengembangan SDM pelatihan ... (sinyal terputus).

KETUA RAPAT:

Ternyata di Madura sinyalnya kurang bagus, Bapak Slamet beli handphone, beli laptop tidak beli sinyalnya. Kita tunda dulu selanjutnya Bapak Ansy Lema, silakan. Bapak Slamet nanti ulang lagi.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Saya belum Ketua, Luluk.

KETUA RAPAT:

Habis ini Ibu, habis ini santai.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oke, siap.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Selamat siang Ibu Menteri dan jajarannya.

Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri tampak sekali pendekatan pemberdayaan kesejahteraan buat masyarakat dan petani hutan itu bagus. Dan juga pendekatan yang bernuasa keberlanjutan lingkungan hidup itu oke banget Ibu. Saya hanya memberikan cacatan, dari tadi tentang masyarakat sekitar hutan dan petani hutan. Tetapi dimana perhatian dan keberpihakan kita kepada para penyuluh kehutanan. Saya melihat penyuluh kehutanan ini menjadi perpanjangan tangan KLHK untuk bisa menjangkau kepada para petani dan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, menurut saya mereka ini harus diperhatikan kesejahteraannya, diberi sembako, bahkan diberi skill sehingga *agro forestry* yang ada di banyak tempat itu apalagi perhutanan sosial ini semakin banyak bisa digunakan fungsinya secara baik oleh para penyuluh ini Ibu.

Nah, karena itu jangan lupakan penyuluh Ibu. Petani bisa berdaya, masyarakat bisa berdaya kalau penyuluhnya lebih dulu diberdayakan dan di Peraturan Menteri Ibu itu sudah dijelaskan, bahkan para penyuluh dalam katagori swadaya masyarakat dan penyuluh swasta ini bahkan boleh mendapatkan CSR dari korporasi. Nah, menurut saya kita juga perlu berpikir supaya para penyuluh ini, ini juga mendapatkan CSR sehingga kemudian mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Biaya operasional mereka sangat minim cuma Rp480 ribu tidak mungkin kita bisa melakukan itu.

Yang kedua Ibu, saya pikir bukan klise kalau kita bicara tentang bagaimana membenahi sinergitas antar lintas kementerian. Karena itu saya mendukung apa yang dikatakan oleh Kyai Hasan dan Juga Kyai Johan sebelumnya, ini harus fokus kita lakukan, sehingga dalam satu paket

sembako dan bantuan itu ada macam-macam. Contoh, hari ini cabai rawit itu banyak produksinya dihasilkan tetapi petani tidak tahu pasarnya dimana. Nah, mungkin untuk masyarakat kehutanan kalau KLHK mau ini bisa diambil Ibu. Sehingga kemudian saya mendukung untuk segera kita duduk bersama dan memikirkan tentang hal ini.

Saya kira momentum ini pendekatannya tidak melulu harus reaksioner Ibu, tetapi juga harus visioner. Momentum ini harus kita pakai bukan sekedar keluar dari krisis tetapi harus membuat loncatan-loncatan besar. Karena itu menurut saya kita jangan melulu pendekatannya kuratif, tetapi antisipatif dalam jangka yang cukup jauh.

Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bisa dengar suara saya?

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri, Bapak Sekjen dan semua jajarannya Bapak dan Ibu sekalian.

Yang pertama saya juga bersama dengan teman-teman mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu Menteri luar biasa dalam waktu yang singkat mencoba untuk beradaptasi kita dengan semua situasi ini. Satu hal mungkin yang juga ingin tambahkan yang terkait, yang pertama misalnya bantuan sembako ini tolong juga hasil yang bisa diproduksi oleh teman-teman atau masu di sekitar hutan itu bisa dipakai. Contohnya bukan hanya beras dan lain-lain, tetapi misalnya empon-empon itu sebagai anti bodi tubuh itu juga bisa dimasukkan dalam bantuan itu. Saya kira ini juga bisa menggerakkan secara ekonomi karena mereka juga tidak terserap itu semua perkarangannya yang ditanami jahe, kunyit dan lain-lain itu tidak tahu harus dijual kemana dan mereka familiar dengan system online. Dan saya kira ini kalau ini yang kemudian kita serap dan itu kemudian kita kembalikan kepada masyarakat sebagai bentuk sembako ini juga sangat bagus sekali. Plus ini juga bisa didorong oleh Ibu untuk bisa dibeli oleh Kementerian yang lain. Nah, ini pentingnya kordinasi itu, sehingga menggerakkan semua hal

Terus yang kedua, saya juga sepakat Ibu ini yang terkait dengan limbah yang berbahaya. Dulu saja kita sudah dianggap surganya pembuangan limbah berbahaya. Yang harus kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila semua negara semuanya juga menggunakan bahan berbahaya yang ini kemudian masuk entah melalui

pelabuhan-pelabuhan atau pun apa pintu-pintu tikus yang kemudian ini masuk ke Indonesia.

Yang kedua yang terkait dengan limbah berbahaya ini, apakah Kementerian Ibu ini sudah cek dan ricek seberapa banyak rumah sakit yang menjadi rujukan corona itu menyediakan semacam pengolah limbah berbahaya dan itu sudah mereka lakukan protokolnya. Kalau belum ini seperti apa antisipasinya, karena korba-korban itu sudah berjatuh. Terutama rumah sakit yang jelas-jelas ada pasien positif dan kemudian ada yang sampai meninggal itu seperti apa mereka menjalankan protokol ataupun juga Surat Edaran Nomor 2 yang sudah Ibu sampaikan itu. Termasuk juga Puskesmas-Puskesmas kecil sebenarnya Ibu, karena penanganan yang pertama sebelum sampai ke rumah sakit besar inikan sebenarnya juga ada di tempat-tempat yang kecil yang jauh, mereka juga jauh dari sorotan karena hanya rumah sakit yang besar.

Kemudian yang kedua, ini di beberapa tempat hujan sudah mulai jarang turun karena memang kemarau lebih cepat datangnya saya kira. Nah, saya kira mendukung juga dari teman-teman bahwa antisipasi itu menjadi sangat penting, bahwa anggaran untuk penanganan kebakaran hutan ini kalau bisa tidak usah diotak-atik. Apa sih yang bisa kemudian dibantu oleh Komisi IV DPR RI kalau mungkin agar kemudian Pemerintah yang melalui Satgas Covid ini tidak otak-atik anggaran yang terkait dengan ini, baik itu lingkungan hidup ataupun yang terkait dengan keamanan pangan kita.

Terus terang saja secara pribadi agak kecewa juga kemudian kalau yang terkait dengan pangan itupun juga harus menyesuaikan realokasi dan sebagainya, mestinya sih ditambah tidak kemudian mengandalkan dari jatah anggaran yang dimiliki oleh Kementerian kita.

Saya kira itu, terima kasih Ibu Menteri, Bapak Ketua.
Salam sehat untuk semuanya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Luluk.

Selanjutnya Bapak Bambang Purwanto, setelah itu siap-siap Bapak Made Urip senior.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati beserta teman-teman Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Tadi sudah disinggung semua oleh teman-teman terkait dengan *refocusing* anggaran untuk menghadapi *COVID-19* ini. Saya hanya memberikan saran satu Ketua, terkait dengan program Tora yang tidak sasaran yang semula diharapkan untuk membantu para petani dikawasan hutan untuk memberikan status legal terhadap lahannya, sehingga semua kementerian bisa bergerak disana. Masalahnya KLHK menggunakan peta citra satelit yang diploting citra satelit kemudian dibawa kelapangan sebagai peta dasar. Akhirnya dilapangan lahan yang punya masyarakat itu justru tidak dilepas tetapi justru yang dikawasan lain itu dilepas.

Kemudian yang kedua, justru lahan punya perusahaan itu dapat program Tora, tapi petani malah tidak. Untuk itu, mohon kiranya Ibu Menteri melakukan evaluasi kembali agar tujuan yang mulia ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di kawasan hutan.

Kemudian yang kedua, saat ini teman-teman di kawasan hutan juga semua kegiatan berhenti dan bekerja sama dengan perusahaan di sekitarnya juga stop, karena perusahaan juga takut terhadap penyebaran *COVID-19* ini sehingga praktis teman-teman petani di kawasan hutan ini berhenti semua. Untuk itu, perlu juga untuk mendapatkan perhatian.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Bapak Made Urip.
Silakan.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP):

Bapak Ketua yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri dan seluruh jajaran Eselon I yang saya hormati.

Luar biasa terhadap perkembangan ekonomi kita, baik itu dalam skala makro maupun juga mikro, apalagi yang mikro terutama UMKM kita, kemudian para pedagang kaki lima. Nah, ini akan terjadi yaitu banyak orang, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan, karena PHK. Saya kebetulan di Bali, di Bali ini luar biasa dampaknya terutama terhadap dunia resortan kita hampir hotel di Bali itu *zero*, nol. Maka itu saya terutama berkaitan dengan dampak dari *COVID-19* ini, terutama yang di PHK.

Maka itu pertama, perlu dihidupkan kembali yaitu penanaman hutan dan rehabilitasi hutan. Dan ini perlu melibatkan masyarakat, masyarakat diberikan upah. Nah, ini barangkali dalam bentuk apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Endang, yaitu tentang padat karya ini, program padat karya, maka itu

saya dorong kepada ibu untuk melakukan revitalisasi hutan, dan penanaman hutan kembali dengan melibatkan masyarakat.

Yang kedua, yaitu tentang restorasi dan revitalisasi di ... (rekaman tidak jelas) ... sungai, danau, kemudian sampah karena sumber penyakitnya ada disini. Maka itu, kalau kita lihat sekarang ini Yang namanya wabah ini, maka itu sumbernya adalah revitalisasi dan restorsi dari lingkungan, baik itu sungai, danau, dan juga dampak dari penggunaan pestisida yang terlalu berlebihan itu. Maka itu, hal-hal yang seperti ini perlu digarap lebih serius dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk padat karya Ibu Menteri. Karena tujuan kita adalah dalam rangka untuk bagaimana masyarakat kita yang berpenghasilan di area itu bisa didapat lewat program padat karya ini.

Yang ketiga Ibu Menteri, saya ingin mengetuk kepada Ibu Menteri yaitu Pengusaha-pengusaha yang bergerak di industry kehutanan ini untuk memberikan partisipasinya, yaitu memberikan kontribusi terhadap dampak dari COVID-19, baik itu pembagian sembako apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kemudian juga APD misalnya perlu dibantu, jadi ketok hati nuraninya para pengusaha yang bergerak di kehutanan ini.

Yang terakhir saya juga setuju kepada teman-teman bahwa program Bank Pesona ini memberikan dampak yang cukup bagus terhadap masyarakat, terutama Ibu-Ibu yang ada di pedesaan, Ibu PKK dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai program Bang Pesona ini kita potong.

Barangkali itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ketua yang baik hati dan ganteng ini. Mudah-mudahan Bapak Ketua sehat wal'afiat, juga Ibu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Made Urip.

Selanjutnya Bapak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Ibu Menteri dan jajaran.

Saya tidak akan mensikapi masalah *refocusing* pencegahan penanganan COVID-19 karena sudah disikapi oleh teman-teman. Saya khusus akan menyampaikan permasalahan terkini yang dihadapi oleh masyarakat di Dapil saya, ada dua hal Ibu Menteri. Yang pertama adalah dampak kebakaran Taman Nasional Gunung Cerman tahun 2019 yang bukan hanya saja di Taman Nasional tapi juga hutan rakyat. Sekarang dampaknya dirasakan oleh masyarakat di desa-desa sekitar hutan, apabila terjadi hujan

arus air dari arah Taman Nasional Gunung Cermai itu begitu deras sehingga menimbulkan banjir dan juga tanah longsor. Untuk hutan rakyat datangnya juga keawat kebun bibit rakyat, tapi permasalahan yang ada di Taman Nasional ini perlu perhatian untuk tahun ini untuk bisa ditangani oleh Dirjen Konservasi dan Ekosistem.

Kemudian yang kedua, terkait dengan kelompok tani tambak udang yang oleh kelompok masyarakat diduga ada pencemaran. Syukur *Alhamdulillah* dan terima kasih kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang begitu cepat menangani permasalahan ini, artinya *Alhamdulillah* tidak ada pencemaran. Hanya saja kelompok tani itu mengajukan kepada Ibu Menteri, untuk mendapatkan legalitas dalam menjalankan usaha kedepan agar tanah yang dimanfaatkan oleh petani tambak udang yang dari tanah perhutani ini untuk dijadikan bibit pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Mohon Ibu Menteri, untuk dapat segera menurunkan tom teknisnya agar segera mendapatkan keputusan sehingga petani tambak udang ini sudah mendapatkan kepastian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan Ibu Menteri.

Terima kasih.

Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pimpinan Komisi IV DPR RI Bapak Budi yang ganteng.

Silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang saya hormati Ibu Menteri, Bapak Sekjen dan jajarannya.

Saya langsung saja ada beberapa mungkin sedikit pertanyaan dan saran yang ingin saya sampaikan. Pertama, beberapa program yang dijalankan di beberapa eselon di KLHK saya lihat sebenarnya niatnya baik-baik saja, yaitu penyemprotan disinfektan. Nah, yang saya perhatikan ini penyemprotan disinfektan ini banyak sekali dan bukan cuma di KLHK tapi banyak sekali di instansi-instansi lainnya dilakukan di jalan-jalan besar, jalan-jalan umum bahkan diluar rumah-rumah warga. Nah, saya ingin menanyakan kepada KLHK apakah sudah ada *study* mengenai efektifitas dalam penyemprotan disinfektan di luar kalangan rumah. Soalnya secara logis bilamana hujan terjadi kan seharusnya itu mungkin disinfektan itu langsung larut. Jadi apakah itu sesuatu program atau kebijakan yang baik. Saya setuju

sekali saja kalau program penyemprotan disinfektan itu dilakukan di dalam rumah-rumah itu sebenarnya sangat baik. Jadi saya ingin penjelasan apakah sudah ada study mengenai hal itu.

Kemudian terkait program-program yang menyentuh kepada ekonomi masyarakat tadi banyak sudah disentuh oleh teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI dan saya mendukung penuh harapan saya program-program seperti Bang Pesona maupun bibit rakyat itu juga bisa ditambahkan. Bahkan untuk Bang Pesona untuk permasalahan pangan saya menanyakan apakah porsi Bang Pesona itu mungkin bisa sedikit dirubah jadi mungkin porsinya lebih banyak untuk misalnya membeli ternak ayam ataupun bebek yang bisa menghasilkan pangan dalam waktu yang lebih cepat.

Terkait juga program kebun bibit rakyat, kami mengharapkan ada kebijakan untuk mungkin menyederhanakan persyaratannya karena setahu kami salah satu syarat untuk program kebun bibit rakyat ini memiliki luas minimal areal tanam 25 hektar. Dengan bantuan sebesar kompensasi 50 juta ini untuk 25 hektar mungkin agak jauh ya perbandingannya. Jadi mungkin kami meminta apakah ada dispensasi ataupun resisi khusus masalah bantuan program kebun bibit rakyat tersebut.

Kemudian dengan banyaknya pemotongan-pemotongan anggaran di lintas kementerian dan lembaga yang kita tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah dan saya selalu percaya kerja kita akan lebih mudah bila kita saling bahu membahu, saling tolog menolong. Termasuk juga instansi-instansi atau organisasi-organisasi yang bisa di saat-saat sulit ini meringankan beban kita semua.

Terkait adanya program-program yang ada pengurangan juga, contohnya di Dirjen Konservasi. Saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman KLHK sudah memulai komunikasi dengan kemarin WWF yang saya menyambut baik kalau langkah itu memang benar terjadi karena konservasi maupun perlindungan terhadap satwa liar itu juga adalah hal yang penting juga dan saya rasa kalau banyak bantuan yang kita bisa sinergikan itu akan lebih baik untuk kita semua.

Jadi bilamana perlu seperti Rapat Kerja-Rapat Kerja sebelumnya saya rasa waktu itu sudah ada pernyataan dari Mbak Kiki yang pertama bilang bahwa kami siap untuk memediasi dan bilamana itu sudah dijalankan kami menyambut sangat baik ada langkah-langkah Ibu Menteri dan KLHK yang sudah mungkin komunikasi.

Dan terakhir saya melihat ada porsi anggaran untuk Balai Riset dan Inovasi, tadi saya mendengar dari Ibu Endang juga mengenai potensi yang ada di sekitar hutan kita. Saya rasa ini adalah hal yang perlu diperjuangkan terus, riset-riset maupun inovasi dari sumber-sumber potensi hutan kita. Karena memang luar biasa siapa tahu dengan riset dan inovasi ini ada obatan-obatan herbal yang bisa ditemukan untuk menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. Saya harapkan program riset dan inovasi tersebut bisa

terus dijaga dan bahkan mungkin bisa ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang.

Saya kira demikian, doa saya kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Selanjutnya yang terakhir Bapak Sumail.

Pak Sumail kok suaranya tidak ada.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi):

Ganti saya dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Sumail di *keep* dulu.

Silakan anak muda yang ganteng dari Madura silakan.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi):

Terima kasih Pak Ketua.

Ijin melanjutkan.

Terkait *refocusing* Ditjen PSLB3 ini ada tentang penganggaran APD untuk petugas kebersihan. Yang saya pertanyakan petugas kebersihan ini di daerah mana dan yang seperti apa.

Yang kedua ada tentang anggaran kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan untuk PMI, kendaraan pendukung disinfektan, tanki dan pompa. Ini juga belum jelas penganggarnya untuk siapa, kalau boleh saya sarankan terkait masalah petugas kebersihan hari ini juga ada di garda terdepan untuk melawan *COVID*. Selain untuk kendaraan untuk PMI saya sarankan untuk memberikan tunjangan kepada petugas kebersihan agar kehidupannya lebih terjamin.

Yang kedua, terkait masalah fasilitas untuk menangani sampah, baik mobil sampah ataupun kendaraan sampah ataupun berupa tempat pengolahan sampah hal ini tentunya perlu dianggarkan selain melihat

lingkungan sosial. Ibu Menteri, diharapkan untuk melihat lingkungan, lembaga pendidikan ataupun lembaga pondok pesantren yang juga perlu diberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat karena pondok pesantren ini sebagai dapur generasi kita. Tentunya juga diberikan fasilitas tentang transportasi sampah ataupun tempat untuk pembuangan sampah. Itu yang dapat kami sampaikan Ketua.

Yang terakhir, untuk Ibu Menteri terkait masalah hari ini dengan adanya virus ataupun wabah *COVID-19* diminta untuk lebih hati-hati kepada para importir sampah ataupun kepada para pengusaha yang tidak sesuai ataupun tidak mengikuti aturan dari Menteri.

Mungkin itu sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya persilakan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan jawabannya. Kalau belum ada penjelasan lebih lanjut dari apa yang disajikan masalah kesimpulan dan keputusan nampaknya agak sulit dibuat hari ini.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua yang terhormat,
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih berbagai masukan dan tadi beberapa catatan yang mengingatkan tentang Karhutla, tentang Gakkum, tentang pengawasan dan lain-lain itu pada dasarnya kami catat. Dan nanti bila diperlukan saya kira kita bisa buat yang tertulis. Tetapi secara umum saya lihat yang paling banyak berkenaan dengan bagaimana kita memitigasi masyarakat dalam target KLHK dan Komisi IV DPR RI.

Seperti yang telah kami laporkan pada Rapat Kerja yang lalu bahwa selain stimulus ekonomi, kepada usaha kecil maka sebetulnya sangat penting tadi seperti yang disampaikan oleh kebanyakan dari yang terhormat Anggota Bapak dan Ibu serta Pimpinan berkenaan dengan bagaimana dukungan kita kepada target kita, yaitu masyarakat kelompok tani sekitar hutan dan pelaku kinerja lingkungan.

Saya mohon ijin untuk melaporkan kembali bahwa untuk memitigasi atau membantu mengatasi kesulitan-kesulitan mereka akibat *COVID-19* maka beberapa kegiatan yang ada dan sudah diotak-atik oleh KLHK, yaitu pertama dukungan kepada kelompok usaha perhutanan sosial dengan membeli

produk koperasi atau KPH-nya, kelompok taninya untuk mendukung kesehatan tenaga medis.

Kemudian melakukan peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini isinya adalah promosi dan pemasaran produk kelompok usaha perhutanan sosial dan tadi saya mendengar bahwa ini perlu diperluas kepada kelompok tani hutan yang lain, tidak hanya kehutanan sosial tetapi juga termasuk mitra-mitra konservasi. Saya kira di Rapat Kerja yang lalu ini juga sudah diberikan catatannya oleh para yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota.

Jadi di dalam catatan ini misalnya yang berupa produk tadi seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Dan lain-lain 14.000 paket kira-kira seperti jahe instans, wedang uwuh, temu lawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, sereh wangi, pasak bumi, jahe merah dan lain-lain. Jadi ini nanti distribusinya akan ke rumah sakit yang sangat dasyat penyakitnya adalah di Kota Jakarta, 13 rumah sakit sudah kita report. Tetapi rencananya untuk rumah sakit-rumah sakit ini nanti yang akan dikordinasikan untuk pendistribusiannya melalui Sekretariat Komisi IV DPR RI.

Kemudian percepatan distribusi stimulan ekonomi, alat ekonomi produktif tadi ditanyakan juga. Jadi yang kita sebut stimulan ekonomi, alat ekonomi produksi selain pelatihan adalah alat-alat seperti penggilingan kopi, setup madu, alat untuk lebah madu, pembuatan sirup, destilasi minyak kayu putih dan lain-lain. Jadi dengan nilai kira-kira Rp200 juta per paket ini kurang lebih dananya Rp47 miliar, ini kita *record*.

Selain itu adalah penyelenggaraan pelatihan jarak jauh. Tadi ditanya desainnya seperti apa, jadi kira-kira desainnya adalah target pertama, pola pertama, yaitu pada wilayah yang sinyalnya tentu saja baik. Yang pola kedua, yaitu untuk petani maksimum 5 orang berkumpul di satu tempat, lalu bersinergi didampingi oleh satu pendamping. Para peserta Diklat atau petani-petani ini mendapatkan honor selama mengikuti training. Kemudian juga mendapatkan bantuan pulsa, bantuan misalnya. Kemudian ditambah lagi dana transport. Jadi bantuan-bantuan seperti ini.

Oke, saya memahami dan saya minta Dirjen dan Kepala Balai Penyuluhan untuk mencatat bagaimana evaluasi efektifitas, sebab memang ada kebutuhannya. Jadi desainnya adalah dia kira-kira dilaksanakan selama 4 hari, hari pertama pembukaan dan penyampaian materi dengan metode *teleconferance*, aplikasi *zoom*, *skype*, *google* dan lain-lain. Disinilah yang pada hari pertama ini yang diberikan pengantarnya oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat sebagai pengantar untuk motivasi, kemudian baru dengan substansi. Hari kedua dan hari ketiga dilakukan belajar mandiri menggunakan aplikasi e-learning kemudian belajar Hutsos dan juga penyuluhan. Jadi diberikan pekerjaan rumah untuk exercise dengan situasi lapangannya. Lalu hari keempat dilakukan evaluasi dan penutupan. Jadi kira-kira desainnya akan seperti itu.

Kemudian yang lain adalah pemberian bantuan Pemerintah dalam bentuk Bang Pesona. Kami sepakat ini tidak diganggu dan tujuannya adalah memberikan stimulan kepada penerima bantuan untuk meningkatkan kemampuan usaha. Kemudian cara alternatifnya peruntukannya *agro forestry*, *agro forestry* artinya ada tanaman kayu keras, ada juga buah-buahan, kemudian simpul pastur ada tanaman kayunya, ada ternak, lalu juga buah-buahan. Yang selain itu juga boleh untuk jasa lingkungan, jadi untuk bisnis pariwisata.

Jadi itu kurang lebih langkah-langkahnya dalam catatan KLHK, apabila ini semua bisa dilakukan dan berlangsung dengan baik. Saya nanti akan minta kepada Dirjen menyiapkan matrik untuk kapan pelaksanaannya, tadi seperti yang diminta oleh para yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota. Kalau yang pelatihan menurut saya minggu depan harusnya sudah bisa dimulai, sebab saya sudah minta lama, sudah minta dua sampai tiga minggu tentang ini.

Kemudian kalau misalnya ini berlangsung dengan baik, maka sebetulnya padat karya langsung dari kehutanan itu akan melibatkan 617.225 orang sementara itu dari pemanfaatan kawasan hutan dari kelompok-kelompok yang memanfaatkan itu kira-kira 500.000 an orang dan dari kegiatan perhutanan sosial kira-kira 1,3 juta kepala keluarga. Jadi kalau kursus kita memroyeksikannya dengan Kepala Keluarga. Jadi sebetulnya tadi catatan-catatan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI secara prinsip sudah masuk di dalam konseptualisasinya, hanya memang dalam teknisnya nanti kami akan mintakan secara detail menurut matrik, waktu dan lain-lain.

Kehutanan sosial kita sekarang sudah 4,1 juta hektar sebetulnya bukan 2,8 juta lagi. Jadi ini pada posisi Maret sudah 4,1 juta memang bunyinya 12,7 itu secara ideal. Jadi secara keseluruhan sampai dengan seluruh program Hutsos ini akan selesai. Terima kasih, bahwa sudah didapatkan bahwa ada dukungan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk kita menyelesaikan segera masalah-masalah ini.

Kemudian saya juga memperhatikan secara sungguh-sungguh dan kami akan bahas nanti bersama Gakkum, Perhutani dan para pemangku kawasan hutan. Jadi di Kementerian ini ada pemangku-pemangku kawasan hutan yang bertanggungjawab seperti Dirjen PHPL, Dirjen KSDAE, kemudian Dirjen DAS untuk hutan lindung, sekarang hutan lindung saya sudah minta juga supaya PHPL juga terlibat. Itu termasuk Perhutani untuk memperkuat pengamanan kawasan tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa yang terhormat Anggota.

Kami juga berterima kasih untuk Karhutla, memang selama ini sudah dicoba diikuti oleh Dirjen PPI dan memang refocusing dana PPI, misalnya dana-dana untuk perjalanan keluar negeri, konferensi dan lain-lain itu seluruhnya saya minta sudah harus masuk dan ditambahkan untuk Karhutla. Jadi dengan refocusing ini sebetulnya Karhutlanya sudah ditambahkan.

Kemudian saya akan mengecek soal tanaman jagung di kawasan, ini menurut saya agak serius Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat. Sebetulnya untuk mengantisipasi pangan *pasca COVID*, kalau kita ini terus sampai dengan akhir Mei atau sampai mid June, ini memang cukup rawan. Oleh karena itu, sudah ada kejadian di lapangan bahwa masyarakat minta waktu sebetulnya nanam jagung, dia sudah nanam sendiri, kemudian sulit untuk dimasak, dihancurin tanamannya. Oleh karena itu, atas diskresi Kepala Balai, Dirjen Konservasinya juga mengambil langkah-langkah arif. Tapi kita kontrol terus, itu lahan kira-kira 2 hektar.

Jadi tadi ini disampaikan juga oleh yang terhormat Anggota, saya kira ini kami akan coba bahas bersama-sama dengan Perhutani dan Direktorat Jenderal Konservasi dan PHPL. Saya kira ini hal yang sangat positif tetapi secara konsep kami segera persiapkan.

Kemudian beberapa hal yang diminta untuk dievaluasi kita akan evaluasi, kemudian terkait dengan sembako Pimpinan. Saya kira di Rapat Kerja yang lalu sudah kita bahas, pada dasarnya dalam kaitan dengan target KLHK. Masyarakat kita, kita pakai pola CSR melalui asosiasi dan tadi sudah mendapatkan restu dari Pimpinan dan Anggota yang terhormat pada Rapat Kerja yang lalu, kita akan lakukan.

Kemudian terkait dengan motor sampah, saya memahami betul bahwa ini memang sangat penting tetapi memang kita mengalami hambatan ketika di Bappenas mengatakan bahwa sudah tidak boleh lagi ada motor sampah. Tetapi dengan situasi sekarang ternyata motor sampahnya tidak hanya berfungsi untuk angkut sampah tetapi ternyata dia adalah bisa menjadi modifikasi untuk motor angkut peralatan pompa disinfektan dan lain-lain. Di dalam refocusing ini kita persiapkan 275 unit. Nanti saya akan minta lagi Dirjen PSLB3 Pimpinan, untuk di-*exercise* kembali seperti tadi arahan pertama kali dari Ketua.

Kemudian yang terhormat Bapak Budi, memang KLHK memang belum pernah melakukan penelitian tentang hal ini, tetapi catatan Pimpinan bahwa untuk disinfektan itu lebih diorientasikan ke rumah-rumah saya kira itu juga yang kita coba lakukan. Memang ada juga di gang-gang tapi saya kira saya setuju bahwa kita focus ke rumah-rumah menurut kebutuhan. Dan inipun sebetulnya bisa karena ada paketnya itu 275 paket, antara kendaraan angkut, pompa semprot dan lain-lain itu sudah direncanakan oleh Ditjen PSLB3.

Kemudian terkait dengan kesiapan menghadapi limbah infeksius atau fasilitas pelayanan kesehatan, memang setelah ada edaran beberapa daerah, bupati, walikota dan gubernur juga sudah mulai mendorong rumah sakit-rumah sakit umum daerahnya dan beberapa daerah sudah meminta kepada kami dispensasi terhadap perijinan incinerator dan lain-lain dan sebetulnya di dalam surat edarannya sudah masuk. Dan saya berterima kasih kita akan melakukan pengawasan dan evaluasi tentang ini.

Tetapi secara umum hal-hal yang menjadi kebijakan telah diusahakan oleh Bapak Sekjen dan para Dirjen untuk terinformasikan kepada daerah

melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi. Kami akan evaluasi semua yang Tora dan sebagainya. Tentu yang bencana alam dan lain-lain akan menjadi, bukan akan tetapi telah menjadi perhatian kami dan akan kita perkuat. Tadi ada catatan juga tentang pinus di Jabar oke akan kami perhatikan dan kami akan cek.

Kemudian tentang Polhut, saya berterima kasih sangat mendapatkan dukungan ini. Kita memang sangat kurang tenaga Polhut tetapi tentu saja proses pengadaannya itu hanya dalam kapasitas kami mengusulkan kepada Menpan. Kami sudah berusaha juga beberapa kali, akhirnya Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, kami akan meminta ini semua Eselon I, Bapak Sekjen juga ada untuk dilakukan *exercise* kembali Pak Ketua, yaitu untuk Sekretariat Jenderal, kemudian *exercise* untuk Inspektorat Jenderal, namun mohon ijin Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, sebagai catatan saja yang untuk Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 dengan dana Rp8 triliun dia dana pengawasannya Rp66 triliun. Tetapi dengan situasi yang seperti ini tadi catatan Bapak Ketua, kami akan perhatikan. Hanya memang Irjen sendiri sudah mencoba melakukan pengawasan dengan pola *online*. Tapi kami akan evaluasi ini, jadi kita akan *exercise* lagi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, lalu PDASHL. Jadi beberapa yang terhormat Anggota kita akan lihat konsentrasinya di kebun bibit rakyat, kebun bibit desa dan bangunan konservasi tanah dan air yang mengantisipasi untuk penanganan longsor, banjir dan sebagainya. Ini saya akan minta lagi Bapak Dirjen dan Bapak Sekjen, *exercise* di Pengendalian DAS Hutan Lindung.

Lalu juga *exercise* lagi di Badan Litbang, karena memang dia memang kita mempersiapkan sebenarnya badan ini nanti ada badan baru sebetulnya. Cuma memang kepotongnya baru 5% Pak Ketua, ini kita akan *exercise* lagi ini. Kalau misalnya masih bisa diatasi pola operasionalnya di badan baru ya harusnya diatasi lagi.

Kemudian *exercise* lagi di Ditjen Gakkum. Saya akan minta lagi Pak Sekjen dan Dirjen Gakkum untuk *exercise* tetapi sebagai catatan pembahasan awalnya sih beberapa hal dapat diatasi dengan pola online dan penguatan-penguatan didukung administrative tetapi nanti kami akan cek kembali.

Kemudian terakhir *exercise* akan kita lakukan di PSLB3, tadi sangat banyak catatan dari yang terhormat Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota untuk PSLB3 akan di-*exercise* kembali dan dengan tantangan antisipatif situasi yang cukup berat nanti sebagai limbah dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kemudian juga di Badan Restorasi Gambut, kita akan *exercise* kembali. Sebagai catatan bahwa kenapa Badan Restorasi Gambut seperti ini konfigurasinya. Karena pertama, dia nyari lokasinya susah untuk konstruksi, yang kedua konstruksi itu juga dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dari bulan Juli, Agustus, September dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya alasan-

alasanya tetapi tetap kami akan minta Bapak Sekjen melakukan exercise kembali bersama para pejabat Eselon I yang tadi telah kami sebutkan.

Demikian Bapak Ketua, kurang lebih jawabanya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Terima kasih atas berbagai catatan, arahan-arahan dan warning kepada KLHK untuk semakin memperkuat pengawasan dan antisipasi pada situasi yang berat *COVID-19* ini.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya Ibu Menteri.

Anggota silakan ada yang akan menanggapi?

Pak Darori, Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Siap.

Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, rincian *refocusing* anggaran ini masih akan dipelajari lagi pergeseran-pergeserannya. Sehingga bisa menghasilkan secara maksimal, maka saran saya diberi waktu kepada Ibu Menteri untuk menyelesaikan mungkin waktunya tidak terlalu lama sehingga bisa bekerja lebih cepat lagi *refocusing* dan pergeseran anggaran yang disampaikan.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kanjeng.

Yang lain silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu saja Pak Ketua.

Ibu Menteri, terkait dengan ini saja Ibu Menteri, itukan Sumatera Barat itu, itukan sudah dapat program pengolahan limbah B3. Itu pejabat Pemerintahnya setempat maupun Kadesnya minta itu segera direalisasikan.

Demikian saja Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya, kami perhatikan Bapak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, Riezky Aprilia.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ibu Menteri beserta jajaran.

Setelah saya mengikuti Rapat Kerja kita hari ini, saya memohon kepada KLHK itu untuk mungkin menguatkan tadi yang Bapak Darori sampaikan bahwa memang ini kita butuh merevisi atau mengevaluasi ulang terkait hal-hal ini. Karena saya baca kembali dari paparan Ibu itu ada hal-hal yang mungkin masih bisa kita geserkan ke hal-hal yang lebih maksimal. Jadi mungkin harus diadakan rapat selanjutnya dan dalam tujuan untuk mengevaluasi lagi program-program yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri.

Sekian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang lain silakan ada yang mau menambahkan?
Sudah cukup Anggota?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Usul Bapak Ketua, Johan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Johan silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya usul kesimpulannya dua, karena setiap Rapat Kerja ini wajib ada kesimpulan. Kesimpulan pertama kita menerima laporan Ibu Menteri sebagaimana biasa. Yang kedua, menyetujui apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri untuk melakukan *exercise* kembali terhadap masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Itu saja Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang lain silakan.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Satu Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa?

Pak Charles dulu setelah itu Mbak Alien.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ibu Menteri yang terhormat.

Saya pikir memang tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki, tapi juga mungkin dalam forum ini Bapak Ketua, beberapa hal yang sudah ada kemajuan beberapa hal yang sudah kita sudah kita sepakati juga bisa lebih diinikan, sehingga pada pertemuan Rapat Kerja yang berikutnya sudah ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan utama kita Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Charles.

Selanjutnya Mbak Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan bahwa inikan masih untuk difocusing kembali ke Dirjen-Dirjen dari KLHK. Mungkin lebih baiknya kita rapat hari ini kita skorsing saja sampai kita menunggu kesiapan dari LHK untuk menyampaikan hasil refocusing yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada Ibu Menteri.

Ijin itu, mungkin bisa diskorsing dulu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang lain Anggota silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua, ini kalau kita menyangkut waktu kita berharap ini tadi Ibu Menteri telah memberikan beberapa *exercise*. Kita minta waktu secepatnya, kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan pelaksanaan program-program berkaitan dengan *COVID-19*. Tentu saya berharap kita sepakati juga tadi menyangkut refocusing tetapi kita minta waktu secepat-cepatnya. Kalau memungkinkan dalam Senin mungkin sudah selesai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Anggota? Tidak ada lagi?

Jadi Ibu Menteri ada alternative apakah, kalau Rapat Kerja harus ada kesimpulan atau kita skors kita lanjutkan nanti setelah angka-angka yang diusulkan dan kesepakatan kita bersama menjadi jelas.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Bapak Ketua yang terhormat
Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Terima kasih.

Kalau boleh kita minta waktu untuk *exercise* dan ini diskorsing saja Pak Ketua. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak mengalami perubahan ini untuk diketahui oleh yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota dan yang sudah bisa mendapatkan katakanlah tadi rasanya semua setuju soal e-learning. Dan rasanya semua juga bisa sepakat untuk kita bisa mulai di Dapil masing-masing, sehingga Dirjen PSKL juga sudah bisa memulai mereka katakanlah

kata pengantar, sambutan dari yang terhormat Anggota Pimpinan di Dapil untuk memulai bisa dilakukan. Karena ini juga kita menolong masyarakat secepat-cepatnya.

Jadi demikian Bapak Ketua, kami setuju untuk bisa diskorsing dulu saja. Saya juga memperhatikan tadi catatan yang terhormat Bapak Darori, bahwa masih ada kemungkinan penghematan kembali, tetapi dalam sidang kabinet paripurna kemarin Bapak Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan bahwa penghematan ini nanti yang akan datang ini betul-betul yang tidak mengganggu lagi hal-hal padat karya, pemberdayaan masyarakat dalam rangka *COVID* dan lain-lain. Jadi kita juga masih menunggu hal tersebut. Tapi *exercise* yang ini berdasarkan catatan dari yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota, dan Pimpinan ini kita tetap lakukan.

Demikian Ketua, kami setuju skorsing.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi teman-teman Anggota, Ibu Menteri kalau diskorsing itu harus 1x24 jam menurut Tatib.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau begitu jangan Bapak Ketua, ini mesti rapat dulu sama BRG.

KETUA RAPAT:

Nah, ini masalahnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Rapat dulu sama Perhutani tadi yang soal nanam jagung. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Anggota ada masukan?

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Charles silakan, setelah itu Mbak Alien.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ingin menambahkan apa yang disampaikan Ibu Menteri, menurut saya beberapa hal yang sudah bisa kita simpulkan sebagai sebuah hal yang kita sepakati disepakati. Sedangkan hal-hal yang memang masih harus ada perbaikan-perbaikan dari Ibu Menteri kita bisa lakukan dalam Rapat Kerja yang berikutnya.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Mbak Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua, skorsing kan bisa diputuskan bersama, memang 1x24 jam, tetapi kalau memang dalam penentuan skorsing itu tidak bisa selesai 1x24 jam kan kita bisa sepakati bersama, kira-kira berapa hari.

KETUA RAPAT:

Mbak Alien, menurut Tatib skorsing itu tida boleh lebih dari 1x24 jam, ini Tatibnya. Jadi kita lagi buat dulu kesimpulannya, mohon waktu sebentar, supaya semua pihak kita semua sudah bekerja keras, bekerja juga dengan baik dan tanggungjawab, ini semua untuk bangsa dan negara bukan bicara daerah pemilihan ataupun partai. Jadi ini lagi disusun dulu kata-kata yang baik, agar Ibu Menteri tetap bisa berjalan bersama Eselon I nya kami juga tidak dibilang melanggar Tatib.

Sebentar ya Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Sebentar, lagi disusun dulu kata-katanya.

Anggota yang terhormat, Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi saya mencoba membuat kesimpulan, mudah-mudahan ini jangan tengah yang terbaik.

Silakan ditampilkan sambil diperbaiki yang bawah.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai *refocusing* kegiatan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 mengalami penghematan atau pemotongan sebesar Rp1.582.683.400.000,00 sehingga menjadi Rp7.736.642.416.000,00 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap ketua, Setuju.

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi kembali rincian *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada tanggal 20 April 2020.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya Ketua, setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Perihal jamnya nanti disesuaikan apabila Senin ada rapat dengan Presiden bisa kita undurkan siang hari Ibu Menteri, yang penting tanggalnya dulu kita putuskan.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menyetujui *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.014.469.575.000,00 untuk mendukung program bantuan sosial, bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan

hutan terutama kelompok tani hutan dan kelompok kehutanan serta para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak *COVID-19*.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua, usulannya kami setuju tetapi sebagai informasi saja bahwa Rp1 triliun *refocusing* ini bukan 10% tetapi 13,11%.

KETUA RAPAT:

Ya, disini tidak dicantumkan persennya, setuju ya Ibu Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya akibat kegiatan penanganan *COVID-19* disamping terus meningkatkan kegiatan layanan audit internal serta kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Mohon Ketua, dipikir sebentar.

Tadi kita berbicara tentang pengelolaan sampah dan bahan beracun ini fokus kepada peralatan. Kalau kita sebut sampah, limbah, bahan beracun ini akan memperluas. Melaksanakan program dan tetap memprioritas, ini juga artinya bisa macam-macam, berarti dia tidak boleh dipotong, kira-kira seperti itu Ketua. Untuk memprioritaskan misalnya sarana dan prasarana penanganan limbah infeksius, itu lebih spesifik Ketua. Saya agak khawatir soal ini.

Terima kasih Ketua.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Betul, sarana dan prasarana.

KETUA RAPAT:

Coba diperbaiki tadi apa kata.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Prasarana dalam penanganan limbah infeksi, tadi ada yang minta juga untuk RSUD dan lain-lain. Jadi penanganan fasilitas pelayanan kesehatan dan penanganan limbah infeksius, termasuk tadi sudah sarana termasuk kendaraan tadi. Karena buat saya yang agak krusial dalam tanda kutib di eksekutif sendiri kendaraan. Limbah infeksius akibat *COVID-19*.

Demikian, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota tolong dibaca dulu, nanti saya akan bacakan ulang.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan fasilitas layanan kesehatan dan penanganan limbah infeksius akibat kegiatan penanganan *COVID-19*. Di samping itu terus meningkatkan kegiatan layanan audit internal serta kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan kembali anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, mengingat tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat penting, diantaranya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Anggota?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, saya minta maaf karena saya nanti saya harus tandatangan kesimpulan ini rasanya saya agak sulit untuk menerima yang butir 6 ini karena sepenuhnya otoritas berada di tangan Bapak Presiden.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masalahnya begini Ibu Menteri, karena kami dapat info kemungkinan Kementerian/Lembaga akan dipotong kembali. Kalau ini dipotong kembali apakah cukup LHK menjalankan fungsinya, yang mana dari Rp9 triliun sekian sudah dipotong. Kalau Ibu Menteri keberatan kita hilangkan, tidak ada masalah bagi kami.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, seperti KKP kemarin kesimpulannya sama ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jangan Ketua, saya ini inkoperatif banget jadi rasanya sulit untuk mendahului Bapak Presiden Ketua. Mohon ijin kalau boleh ini dihapus saja nomor 6.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya inikan baik, karena yang meminta bukan LHK tetapi Komisi IV DPR RI yang meminta.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSYAH)

Dukungan buat Ibu Menteri ini, tidak apa-apa Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:

Jadi Ibu Menteri tidak setuju?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan siapa yang interupsi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Komisi IV DPR RI kan meminta Ibu Menteri, karena begini terkait mata rantai ini harus kita rasionalisasi juga kepada eksekutif bahwa rasionalisasinya adalah ini salah satu hulunya dalam penanganan *COVID-19* ini. Dan Komisi IV DPR RI yang meminta Ibu Menteri, jadi kita mem-*backup* mitra-mitra terkait, terkait ini.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Iya Ibu Menteri, jadi nanti pemikirannya bahwa kalau nanti pemotongan itu di setiap Kementerian itu kurang nanti tentu rapatnya seperti di Badan Anggaran kemarin untuk menurunkan lagi.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, saya punya catatan nomor 6 ini, yaitu inikan ada satu frasa disitukan "agar", jadi agar ini sebenarnya lebih soft. Ibu Menteri bisa lebih longgar untuk membuat argumentasinya. Justru ini adalah dukungan DPR RI tetapi disitu sifatnya agar bukan ada "wajib" atau apa. Jadi disini Ibu Menteri masih peluang untuk bisa bernegosiasi dengan Pemerintah. Negosiasi itu adalah masih bisa memungkinkan.

KETUA RAPAT:

Tolong teman-teman dengar penjelasan saya.

Ibu Menteri, hal inikan tidak mengikat, kami Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Karena lebih baik

kementerian lain yang tidak terlalu bersentuhan dengan rakyat langsung yang dipotong, tujuan begitu. Tetapi kalau Ibu Menteri keberatan ya kami hilangkan tidak ada masalah. Cuma nanti kalau ada pemotongan lagi kan berarti kita harus Rapat Kerja kembali.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, saya ijin bicara Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ibu Menteri, point 6 ini sebenarnya Komisi IV DPR RI ingin menunjukkan keberpihakan yang kuat untuk mendukung kementerian Ibu, karena melihat ini sangat penting Ibu.

Yang kedua, kami memahami betul Ibu, kekhawatiran Ibu, Ibu sudah sampaikan tadi bahwa point 6 ini bukan berasal dari keinginan Ibu, tetapi memang Komisi IV DPR RI ini harus menunjukkan keberpihakan. Karena apa? Karena KLH ini penting Ibu, maka kami harus menunjukkan itu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya minta maaf karena di dalam Sidang Kabinet Paripurnanya Bapak Presiden mengatakan bahwa beliau tahu persis apa yang dinilai penting dan tidak penting bahkan beliau mengatakan menteri-menteri itu harus pandai menyisir dan bila tidak efektif ya dibuang saja yang tidak efektif.

Jadi kalau boleh misalnya ini akan, saya berterima kasih sekali atas dukungan keberpihakan Komisi IV DPR RI. Tetapi mungkin istilahnya bukan meminta, mungkin apa mendorong mungkin ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mendorong makin hard lagi Ibu Menteri, apalagi mendesak Ibu.

KETUA RAPAT:

Tolong Anggota saya minta tolong Anggota kasih kesempatan Ibu Menteri bicara dulu. Anggota saya minta tolong kasih Ibu Menteri memberikan penjelasan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ini otoritasnya betul-betul 100% di tangan Bapak Presiden, termasuk apalagi itu kemarin sudah ditegaskan di sidang kabinet. Karena di sidang kabinetnya persis kemarin, masa di Rapat Kerja hari ini saya langsung inikan

tetap bersilangan gitu. Jadi saya ingin menjaga etika hubungan saya dengan Presiden saja sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak perlu dimasukkan Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Tidak perlu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

Anggota, saya rasa nomor 6 ini.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Mohon ijin Ketua.

Tapi begini, maksud saya kita bisa memahami suasana kebatinan dari Ibu Menteri, tetapi disisi lain menurut saya bisa dikoreksi Pimpinan ya, bahwa Komisi IV DPR RI juga punya hak untuk berpendapat. Kemudian Komisi IV DPR RI juga punya hak untuk mengusulkan kepada Pemerintah. Nah, kalau misalnya Ibu Menteri tadi dengan segala *background* kebatinannya semacam itu apakah kemudian rumusan ini ditujukan kepada Presiden atau yang mana tetapi Komisi IV DPR RI menurut saya harus punya sikap.

Seperti yang sebelumnya kita bilang bahwa harusnya anggaran untuk pengamanan pangan itu bukan diotak-atik, malah kalau perlu ya ditambah, diambilkan juga dari yang Rp400 triliun sekian itu.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ketua, kalau kalimatnya berharap bagaimana? Kalimatnya mengharapkan kepada Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, harus ingat DPR RI punya hak *budgeting* atau anggaran. Karena kami juga tidak mau mitra kami dipotong lebih, nanti begitu ada rapat dipotong lagi khawatirnya tidak mencukupi tahun anggaran 2020.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua, sesuai dengan Perpu Nomor 1 dan Perpres Nomor 54. Oleh karena itu, memasukkan angka keenam ini saya kira juga sudah berjalan. Tidak ada lagi akan terjadi perubahan terhadap dana yang ditarik dari Kementerian itu, karena Perpres ini sudah berlaku. Oleh karena itu....

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi, dengar penjelasan saya dulu Pak.

Saya dapat info Pemerintah akan menyisir kembali anggaran-anggaran yang sudah diputuskan ini. Itu diluar Perpres yang sudah diputuskan Pak, itu infonya seperti itu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya, saya paham Pak Ketua, hanya memang kondisi Kementerian KLH terhadap kesimpulan kita ini bisa saja mungkin dianggap bahwa dia loyal sama Presiden, sehingga tidak ingin memasukkan ini. Kalau hak budget Dewan saya kira juga kita hargai ya, namun demikian sama-sama enaklah kita.

Terima kasih Bapak Ketua.

F-GERINDRA (DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Interupsi Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Bapak Azikin.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah, usulan itu bisa diterima atau tidak sehingga point 6 ini tetap ada, bukan meminta, mengusulkan.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, bisa tidak kalau kata-kata mengusulkan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bapak Ketua, saya minta maaf banget. Tadi yang mengatakan bahwa akan ada pemotongan sebenarnya kan diawali dari yang terhormat Bapak Darori. Kalau masalahnya itu, karena saya Rapat Kerja dengan Dewan itu kan hari ini, padahal kemarin sudah ada perintah dari Bapak Presiden, begitu. Jadi masa saya langsung bilang agar tidak melakukan, misalnya seperti itu atas permintaan Komisi IV DPR RI, posisi saya sangat-sangat sulit, sebab masalahnya kemarin sudah ada di sidang kabinetnya. Dan walaupun misalnya Peraturan Presiden keluar kan seperti apa. Mungkin kita akan melaporkan situasinya tetapi kalau secara tertulis saya tanda kutib, mau tidak mau kalau seperti ini bunyinya kan jadi saya berhadapan dengan kebijakan yang kemarin sebetulnya belum diputuskan si, tetapi sudah mengindikasikan. Jadi saya minta maaf banget Bapak Ketua, yang sedapat mungkin bisa saya lakukan apapun yang diperintahkan oleh Komisi IV DPR RI saya kan biasanya lakukan tidak pernah saya ingkar.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi kalau Bapak Azikin mengatakan mengusulkan itu Ibu setuju tidak?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sama juga Pak Ketua, posisinya kan tetap saya mempersoalkan pemotongan kembali. Padahal itu kemarin di dalam sidang kabinet baru diindikasikan, apalagi yang menyampaikan kan yang terhormat Bapak Darori sebelumnya bukan saya yang melaporkan.

KETUA RAPAT:

Oke, kalau gitu teman-teman Komisi IV DPR RI yang nomor 6 kita hapus saja.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, saya beri masukan Pak Ketua.

Pak Ketua, saya memandang bahwa point 6 ini kita melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar. Ketua, saya ingin mengatakan bahwa point 6 ini adalah hak buget DPR RI yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ketua, karena ini harus disetujui oleh Ibu Menteri, Ibu Menteri tidak mungkin harus berbeda dengan Presiden, nanti dianggap melawan Pemerintah. Saya pikir kita setuju dihapus.

KETUA RAPAT:

Oke, kita hapus ya.

Terima kasih.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Menurut saya Pimpinan, apakah Pimpinan atau Komisi IV DPR RI bisa punya pendapat diluar rapat dengan Kementerian ini dan tetap menyatakan usulan itu kepada Pemerintah. Pertanyaan ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya tidak bisa jawab pertanyaannya Mbak Luluk.

Oke, Anggota ini kesimpulannya cukup dengan 5 kesimpulan. Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja ini.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bapak Ketua yang saya hormati,
Seluruh Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Para Pimpinan Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Saya dengan ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kembali menyampaikan penghargaan saya yang tinggi kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota. Terima kasih untuk tidak henti-henti mengingatkan kami, menyarankan beberapa hal dan betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang tidak pas atas sikap dan perilaku kami.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya mengingatkan kepada saudara Sekjen, bahan untuk hari Senin paling lambat Jum'at sudah diterima oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Tolong dengar dulu saya ngomong. Ibu Menteri ingatkan kepada saudara Sekjen, Ibu Menteri sampaikan kepada saudara Sekjen bahan rapat untuk hari Senin sudah diterima.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua, tidak kedengaran suaranya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, baru *on* terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya minta tolong ingatkan saudara Sekjen untuk bahan Rapat Kerja hari Senin, 20 April 2020 tolong disampaikan kepada Sekretariat selambat-lambatnya hari Jum'at. Karena bahan ini akan dipelajari oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Terima kasih, dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucap *alhamdulillah* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001